Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

LAPORAN AKHIR

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP INOVASI
Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat



2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akhir Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat" dapat kami selesaikan.

Kami sampaikan ucap terimaksih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini. Laporan akhir ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pembaca.

Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2022

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB - 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud & Tujuan 5
1.4 Sasaran 6
1.5 Ruang Lingkup 6
1.5.1 Lingkup Kegiatan 6
1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan 6
1.6 Sistematika Pembahasan 7
BAB - 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI **9**
2.1 Tinjauan Kebijakan 9
2.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 9
2.1.2 Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 9
2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 10
2.1.4 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah 10
2.2 Tinjauan Teori 11
2.2.1 Inovasi 11
2.2.2 Pelayanan Publik 16
BAB - 3 GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT **22**
3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan 22
3.2 Kondisi Inovasi 25
BAB - 4 METODE KAJIAN **32**
4.1 Kerangka Pemikiran 32

bappelitbangda

4.2 Metode Pengumpulan Data 34
4.3 Metode Analisis 34
BAB - 5 ANALISIS HASIL 41
5.1 Analisis SWOT 41
5.1.1 Analisis Kekuatan (*Strength*) 41
5.1.2 Analisis Kelemahan (*Weakness*) 41
5.1.3 Analisis Peluang (*Opportunities*) 42
5.1.4 Analisis Ancaman (*Threats*) 42
5.1.5 Strategi Kombinasi 42
5.2 Inovasi yang Diusulkan 44
5.2.1 Aplikasi PEJOL dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) 44
5.2.2 Aplikasi SIMBASOS dari Dinas Sosial 49
5.2.3 Inovasi dari Disnakertrans 54
5.2.4 Inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 58
5.2.5 Inovasi Klinik UMKM dari Diskopukm 65
5.2.6 Inovasi Aplikasi Visit KBB dari Disparbud 70
5.2.7 Inovasi Gerai KUKMD dari Kecamatan Ngamprah 76
BAB - 6 KESIMPULAN 6-77

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat..... 23
Tabel 3. 2 Jumlah dan Kepadatan Pendudukan Di Kabupaten Bandung Barat 2020 . 24
Tabel 3. 3 Kondisi Jalan Bandung Barat Tahun 2015- 2020 25
Tabel 3. 4 Jaringan Irigasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 - 2020 25
Tabel 3. 5 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014- 2020 27
Tabel 3. 6 Presentase Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2020 27
Tabel 3. 7 Presentase Tersedianya Akses Air Minum yang Memadai di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2020..... 28
Tabel 3. 8 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020 28
Tabel 3. 9 Rekapitulasi Potensi Seni dan Budaya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 29
Tabel 3. 10 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 – 2020 30
Tabel 4. 1 Kebutuhan Data Primer Kegiatan 34
Tabel 5. 1 Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat 41
Tabel 5. 2 Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat 41
Tabel 5. 3 Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat 42
Tabel 5. 4 Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat 42

bappelitbangda

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Admiistrasi Kabupaten Bandung Barat..... 23
Gambar 4. 1 Kerangka Pemikiran ……33
Gambar 4. 2 Langkah Pengembangan 4D..... 36

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 1
PENDAHULUAN

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP INOVASI
"Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat"

BAB - 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi penyelenggara pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Inovasi juga menjadi katalisator untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Kesadaran akan pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 386 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pelaksanaan inovasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diperkuat upaya dan langkah strategis agar inovasi dapat diterapkan. Beberapa dinas di Kabupaten Bandung Barat telah mulai melakukan inovasi dan pembaharuan. Namun data inovasi yang masuk ke Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat relatif kecil, sedangkan di kota/kabupaten lain berkembang cukup pesat. Pemerintah pusat menilai capaian inovasi pemerintah daerah melalui penghargaan IGA (*Innovative Government Award*), sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui KIJB (Kompetisi Inovasi Jawa Barat). Nilai IGA pada tahun 2021 inovasi Kabupaten Bandung Barat menempati peringkat 120 dari 415 dengan skor 47,39 (kategori inovatif).

Permasalahan dan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat juga menjadi acuan dalam pengembangan dan pembangunan inovasi yang akan ditingkatkan. Permasalahan dan isu-isu strategis yang saat ini antara lain terkait permasalahan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

bappelitbangda

Bandung Barat akibat Covid-19, proses pemulihan ekonomi dan pertumbuhan UMKM, masalah kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi, serta indeks aksesabilitas dan mobilitas masih dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bandung Barat membutuhkan beragam inovasi dalam rangka menanggulangi isu-isu yang ada serta agar dapat melakuan pelayanan lebih optimal.

Berdasarkan beberapa data dan isu-isu strategis yang dihimpun, terdapat tujuh perangkat daerah yang akan menjadi referensi dalam pengembangan inovasi terkait pelayanan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM), di antaranya yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Bandung Barat memiliki tata letak yang strategis antara dataran tinggi dan dataran rendah serta dapat berdampak baik bagi setiap unsur apabila dapat dikelola dalam pembangunan yang baik. Namun Permasalah pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat yaitu: a) Indeks aksesibilitas dan indek mobilitas masih di bawah SPM Kabupaten; b) Jaringan jalan yang menghubungan internal kabupaten masih terbatas; c) Belum ada penambahan jaringan irigasi baru; d) Kondisi jaringan irigasi yang ada masih kurang baik; e) Laju alih fungsi lahan dari lindung ke bukan lindung dan dari pertanian ke bukan pertanian tinggi; f) Pengendalian pemanfaatan ruang masih belum efektif; g) Prakiraan peningkatan intensitas penggunaan lahan di Kawasan Walini.

2. Dinas Sosial

Dinas sosial memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di Kabupaten Bandung Barat banyak permasalahan pada bidang sosial, yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini disebabkan oleh: a) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; b) Belum optimalnya penanganan bencana sosial; c) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan human trafficking; d) Belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial,pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial; e) Masih rentan terhadap konflik sosial; f) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan g) Meningkatnya PPKS akibat adanya Pandemi COVID-19

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

bappelitbangda

Masalah pokok terkait tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat meliputi: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Secara empiris, selalu terdapat perbedaan jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan, TPAK laki-laki 83% jauh lebih tinggi disbanding TPAK perempuan yang hanya 40%. Sehingga terjadi ketimpangan pada partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat jumlah penganggur sebanyak 62,695 orang terdiri dari 40.126 orang (64,00%) laki laki dan perempuan sebanyak 22.569 orang (36,00%).

Beberapa hal yang diidentifikasi berkontribusi terhadap masalah-masalah pokok ketenagakerjaan, antara lain: a) Kesempatan kerja terbatas; b) Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja; c) Banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); d) Kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri; e) Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal; f) Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding perdesaan.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Namun dalam pengelolaanya Kabupaten Bandung Barat mengalami beberapa masalah. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi secara umum antara lain : a) Berkurangnya Kawasan lindung akibat alih fungsi lahan, terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU), b) Alih fungsi lahan pertanian (termasuk LP2B) menjadi lahan terbangun, c) Tingginya pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industry maupun limbah padat (sampah), d) Potensi *run-off* water yang tinggi akibat berkurangnya Kawasan konservasi air di utara, e) Potensi gempa dan patahan sesar Lembang, f) Potensi Kawasan longsor akibat Gerakan tanah dan alih fungsi lahan; dan g) Peningkatan kebutuhan akan sumber daya air baku berpotensi untuk pemanfaatan air tanah permukaan.

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UMKM menjadi penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun muncul beberapa masalah yang dialami oleh DISKOPUKM Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan koperasi dan UMKM daerah, diantaranya: a) Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengalami penurunan usaha ataupun berhenti; b) Jumlah Koperasi yang terdata pada tahun 2019 sebesar 667 koperasi, akan tetapi jumlah yang aktif sebesar 527 dan tidak aktif sebesar 140 Koperasi; dan c) Jumlah UMKM yang terdata pada tahun 2019 sebesar 23,08

bappelitbangda

persen, jumlah yang terdaftar sangat penting untuk ditingkatakan guna meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung Barat memiliki asset wisata dan budaya yang besar, namun dua aspek tersebut masih kurang berkembang dan mengalami beberapa masalah diantaranya: a) Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sendiri objek wisata masih rendah; b) Secara umum kualitas akses menuju ke objekwisata masih kurang baik; c) Fasilitas penunjang (fasum dan fasos) di objek wisata masih kurang lengkap; d) Belum ada pemasaran pariwisata daerah yang efektif; e) Kurangnya partisipasi pemuda dalam melestarikan Kebudayaan daerah; f) Kurang Optimalnya promosi budaya tradisonal; dan g) Rendahnya perlindungan terhadap kebudayaan dan cagar budaya di Kabupaten Bandung Barat.

7. Kecamatan

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Kecamatan Ngamprah merupakan Ibukota Kabupaten Bandung Barat dan merupakan kecamatan yang ekosistemnya paling beragam.

Kecamatan Ngamprah harus bisa menjadi pelopor dan contoh bagi kecamatan lain dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat. Beragam layanan administrasi kependudukan, layanan social, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan, memelihara kualitas lingkungan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara keseluruhan, dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan uraian masalah-masalah tersebut Kabupaten Bandung Barat dirasa sangat perlu untuk mengkaji, membuat dan mengembangkan inovasi-inovasi di perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

bapelitbangda

4. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud & Tujuan

Maksud dan Tujuan kegiatan Kajian Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah :

bappelitbangda

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah tersusunnya dokumen rancangan inovasi di 7 perangkat daerah yang menunjang percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis yang tertuang di RPJMD.

b. Tujuan

1. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan dan isu-isu strategis
2. Tersusunnya rancangan inovasi yang berkelanjutan

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah dihasilkannya pekerjaan kajian inovasi di Kabupaten Bandung Barat, adalah agar kajian ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi maupun referensi, serta dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan inovasi yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Kajian Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a) Analisis umum kinerja/pencapaian Kabupaten Bandung Barat terhadap pengembangan inovasi.
b) Perumusan Analisis Strength – Weakness – Opportunity - Threat (SWOT) dan Political – Economy – Social – Technology – Environtmental – Legal (PESTEL)
c) Formulasi *inovasi*

1.5.2 Lingkup Wilayah Kegiatan

Wilayah kegiatan dilaksanakan pada tujuh perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Kecamatan Ngamprah.

bappelitbangda

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Laporan Pendahuluan Kajian Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian laporan antara.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

Bab ini berisikan tinjauan kebijakan dan teori yang terkait dengan penyusunan kajian.

BAB 3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi kajian.

BAB 4 METODE KAJIAN

Bab ini terdiri atas kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan analisis dalam pelaksanaan kajian.

BAB 5 ANALISIS HASIL KAJIAN

Bab ini berisi hasil analisis terhadap kajian yang telah dilakukan.

BAB 6 KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya.

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP INOVASI
"Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat"

BAB - 2
TINJAUAN KEBIJAKAN & TEORI

2.1 Tinjauan Kebijakan

2.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kriteria Inovasi Daerah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi Daerah danf atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan, merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan dapat direplikasi.

2.1.2 Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian. Kebijakan penguatan SIDa juga tercantum dalam roadmap penguatan SIDa, RPJMD, RKPD. Gubernur dan bupati/walikota menugaskan tim koordinasi

bappelitbangda

melakukan penyusunan Roadmap penguatan SIDa. Roadmap penguatan SIDa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lainlain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

2.1.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Sementara pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

2.1.4 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

bappelitbangda

Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk a. mengukur tingkat Inovasi Daerah; b. memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi; c. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*; d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; e. meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (*accepted*) masyarakat, tepat (*appropriated)* dan berkelanjutan (*sustainable*); dan f. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan Inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Inovasi

2.2.1.1 Definisi Inovasi

Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembangnya suatu organisasi. Beberpa organisasi baik itu organisasi sektor swasta ataupun sektor publik seperti organisasi pemerintahan berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi. Inovasi menurut Said dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses, dan layanan. Menurut Hamel, inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisme yang lama dan memberi pengaruh yang siginifikan terhadap cara sebuah majanemen yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu oraganisasi.

Inovasi diperlukan dalam penyelenggaraan suatu oganisasi baik swasta maupun organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan. Inovasi dalam

bappelitbangda

organisasi pemerintahan menjadi suatu tuntutan bagi instansi pemerintahan menyusul semakin meningkatnya desakan dari publik akan adanya peningkatan kinerja dari instansi pemerintahan agar mampu menyelesaiakan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat melalui suatu program dan pelayanan. Inovasi secara relevan dapat digunakan di sektor publik arena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas. Inovasi pada instansi pemerintahan sangat dibutuhkan dalam proses penyediaan pelayanan publik dengan mengembangkan cara-cara baru dan sumber daya baru. Di samping itu, inovasi di sektor publik bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa dihadapkan pada kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran.

2.2.1.2 Aspek-Aspek Inovasi

Suatu inivasi tidak lepas beberapa hal atau aspek penting yang menunjukkan suatu organisasi telah melakukan inovasi. Menurut Suwarno (2008) ada lima hal yang perlu ada dalam suatu inovasi sebagaimana berikut ini:

a. Sebuah Inovasi hadir sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
b. Cara Baru Inovasi juga dapat berupa cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.
c. Objek Baru Suatu inovasi merujuk pada adanya objek baru untuk penggunanya. Objek baru ini dapat berupa fisik (*tangible*) atau tidak berwujud fisik (*intangible*).
d. Teknologi Baru Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari suatu produk teknologi yang inovatif biasanya dapat dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.
e. Penemuan Baru Hasil semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaannya.

2.2.1.3 Tipologi Inovasi

Proses Inovasi merupakan suatu proses yang yang sifatnya kompleks dan tidak dapat dianggap sederhana hanya dengan menunjukkan adanya suatu

bappelitbangda

hal yang baru. Akan tetapi, hal baru tersebut perlu melibatkan aspek-aspek lain didalam konteks organisasi sektor publik atau organisasi pemerintahan yang meliputi adanya proses politik, kebijakan, kualitas, dan lain sebagainnya.

Menurut Mulgan dan Albury suatu inovasi dikatakan berhasil apabila inovasi tersebut merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nayata dalam hal efisiensi dan efektivitas atau kualitas pelayanan. Dengan demikian inovasi meliputi banyak aspek dan sangat kompleks dengan berbagai faktor pendukung serta bukan hanya mengacu pada hal yang baru semata. Inovasi bukan hanya dalam lingkup produk dan pelayanan semata. Inovasi produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mngacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan inovasi tersebut. adapun jenis-jenis inovasi pada organisasi sektor publik menurut Muluk (2008) sebagai berikut ini

a. Inovasi Produk Inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau sebelumnya.
b. Inovasi Proses Inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan adanya perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengeorganisasian yang diperlukan organisasi dalam melakukan inovasi.
c. Inovasi Metode Pelayanan Inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspke interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau meberikan suatu layanan.
d. Inovasi strategi atau kebijakan Inovasi ini merujuk pada pada aspke visi, misi, tujuan, dan strategi baru dan juga menyangkut realitas yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru.
e. Inovasi Sistem Kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolaan organisasi.

Berdasarkan penjelasan dari Muluk diatas, dapat diketahui bahwasanya ada beberapa jenis inovasi dalam sektor publik yang terdiri dari inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi dalam metode pelayanan, inovasi dalam strategi atau kebijakan, dan inovasi sistem. Hal ini menunjukkan inovasi memiliki tipe-tipe atau jenis-jenis yang beragam. Inovasi bukan hanya mengacau pada suatu

bappelitbangda

produk yang baru semata, apalagi inovasi hanya diidentikkan dengan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik.

2.2.1.4 Pengembangan Inovasi

Inovasi bukanlah dapat dicapai dengan begitu mdahnya, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Rogers menyatakan bahwa inovasi memerlukan suatu proses pengembangan yang terdiri dari keputusan; aktivitas dan dampak inovasi yang terjadi dalam pengenalan kebutuhan dan masalah; melalui riset pengembangan, komersialisasi inovasi; difusi dan adopsi inovasi, dan konsekuensi atau dampak inovasi.

a. Mengenali Kebutuhan

Masalah Proses ini dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan yang muncul. Kebutuhan masalah dapat dikenali melalui proses politik sebelum dilaksanakannya suatu peneltian terlebih. Kebutuhan sendiri merupakan sesuatu keingginan dari manusia atau masyarakat akan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan yang tangible namun juga kebutuhan yang intangible. Untuk dapat mengetahui kebutuhan dan masalah tidak dapat hanya melibatkan satu sudut pandang orang, namun juga harus melibatkan cara pandang orang terhadap masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan terkadang suatu masalah dipandang sebagai suatu maslah oleh orang lain, tetapi belum tentu bagi orang yang lainnya. Orang yang terlibat langsung terhadap suatu masalah tentunya berbeda dalam membatasi suatu masalah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlibat secara langsung pada masalah tersebut, sehingga perlu melibatkan pandangan berbagai pihak yang bersangkutan.

b. Riset dasar dan aplikatif

Riset atau penelitian merupakan identik dengan kegiatan yang bersifat ilmiah. Sementara suatu riset atau penelitian aplikatif bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang sifatya praktis. Menurut Eggers dan Singh, yang terpenting dari sebuah ide yang inovatif bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diterapkan, namun ide yang dapat merubah kebiasaan lama, membawa aktor baru bersamaan dalam mengahadapi tantangan perubahan struktur dalam sebuah organisasi. Selain itu, dalam menemukan ide inovatif perlu dilakukan kolaborasi dalam setiap tahapan antara aktor-aktor yang berbeda potensinya dalam rangka mempercepat proses inovasi salah satunya dalam menggagas ide yang kreatif dan inovatif. Pada fase inovasi dapat diketahui ide

bappelitbangda

yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan permasalah yang ada dan dibutuhkan upaya pemecahan masalahnya.

c. Pengembangan

Pengembangan dalam suatu inovasi merupakan suatu tahapan yang dilakukan dengan menentukan ide dan gagasan baru yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Proses pengembangan dilakukan setelah proses penelitian utnuk menentukan inovasi apa tetapi sebelum inovasi tersebut menjadi suatu yang nyata yang siap digunakan. Selain pengembangan suatu ide dapat menjadi bentuk pelayanan, perlu juga dilakukan pengembangan inovasi agar inovasi tersebut terus berkembang dan memberikan dampak atau hasil yang lebih besar dari pada sebelumnya. Inovasi pelayanan publik merupakan proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam pelaksanaan gagasan baru dari praktek baik itu inovasi pelayanan publik yang sifatnya sebagian maupun secara keseluruhan. Sedangan transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa strategi, metode, substansi pelayanan publik, melalui berbagai kegiatan symposium workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic, dan forum pembelajaran lainnya. Dalam transfer pengetahuan terdapat sejumlah aspek terkait hal-hal yang akan ditranfer dari suatu instansi kepada instansi lain secara umum yang terdiri dari tiga kategori utama antara lain:

1) Teknis berupa transfer keahlian, teknologi, proses bisnis.
2) Informasi berupa transfer pertukaran ide dan gagasan.
3) Manajerial berupa transfer sistem, mekanisme, pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya.

d. Komersialisasi

Komersialisasi merupakan aspek pemasaran atau penyebarluasan suatu produk inovasi. Akan tetapi, dalam organisasi atau intitusi pemerintahan tidak dikenal istilah komersialisasi. Dalam sektor publik istilah komersialisasi merupakan aspek penyebarluasan atau sosialisasi produk inovasi. Hal ini menunjukkan proses pneyebarluasan, pemasaran, dan distribusi produk inovasi juga berlaku pada organisasi sektor publik. Penjelasan lebih mendalam mengenai sebuah inovasi merupakan suatu aspek yang sangat disarankan agar dicapainya keberhasilan dalam inovasi, sebab keberhasilan dari penjelasan lebih dalam suatu inovasi akan memicu organisasi dan pegawai atau stafnya untuk bekerja dengan semangat tinggi.

bappelitbangda

e. Difusi dan Adopsi

Pada proses ini suatu produk yang dibuat, pelanggan atau masyarakat memiliki hak utnuk menetukan pilihannya dengan menggunakan atau tidak produk inovasi tersebut. Rodgers menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dapat diterima ke dalam masyarakat. Terdapat empat elemen dalam proses difusi yakni sebagai berikut ini:

1) *An innovation*: inovasi sendiri yang dipersipsikan sebagai objek atau ide baru yang diadopsioleh individuatau kelompok. Makna baru sebuah inovasi tidak juga pakem pada apa yang benar-benar baru secara objektif.
2) *Ommunications channels*: perlu adanya saluran atau media dalam komunikasi dalam mengenalkan inovasi tersebut kepada target atau penerima inovasi pelayanan.
3) *Time*: suatu periode bagi inovasi tersebut untuk didifusikan dan juga wakti bagi penerima produk inovasi untuk menerima atau menolakinovasi tersebut. Waktu proses difusi juga membahas tentang cepat atau lambatnya proses adopsi inovasi.

f. Konsekuensi

Pada proses ini masalah atau kebutuhan pelanggan atau masyarakat yang telah didentifikasi pada proses awal telah terjawab atau tidak. Bahkan seringkali masalah-masalah atau kebutuhan baru muncul sebagai akibat atau konsekuensi dari inovasi yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu siklus dalam inovasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatan bahwasanya terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan atau pembuatan inovasi yaitu dari mengetahui masalah yang didapat di lapangan terlebih dahulu, dilakukan riset dasar aplikatif, pengembangan inovasi, penyebarluasan produk, penerimaan masyarakat terhadap produk inovasi dan dampak dari inovasi.

2.2.2 Pelayanan Publik

2.2.2.1 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat disebut sebagai inti dari penyeleggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemerintah yaitu sebagai penyedia pelayanan publik bagi warga atau masyarakatnya. Bahkan Dwiyanto menyebutkan bahwa literatur terdahulu menyebutkan bahwa “what government does is public service”. Dengan kata lain, tugas dari pemerintah seyogyanya merupakan upaya dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. Para ahli

bappelitbangda

memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki beragam define atau makna. Pelayanan publik secara sederhana dapat dimaknai sebgau suatu layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negara atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.16 Pelayanan publik dapat juga dilimpahkan wewenangnya oleh pemerintah dengan dilaksanakan kepada pihak lain seperti masyarakat atau pun pihak swasta. Selain itu, pelayanan publik juga dapat diartikasi sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pelaksanaannya berdasar pada ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, suatu pelayanan publik dalam pelaksanaanya harus mengacu pada aspek regulasi yang telah mengatur. Sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyediaan layanan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung dilaksanakan melalui istilah yang disebut public sector atau sektor publik, yakni badan-badan pemerintah, kantor pos, sekolah milik pemerintah, perusahaan listrik milik pnerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya. Penyediaan layanan oleh pemerintah bertujuan agar tidak timbul penyalahgunaan. Akan tetapi, pemerintah harus menunjukkan sikap profesionalisme dalam rangka melakukan perannya dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik. Secara regulasi, penyelenggaraan pelayanan publik telah didukung dengan adanya Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kebijakan ini mengharuskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa serta pelayanan administratif. Mengacu pada pendapat ini, pelayanan publik memuat penyedian kebutuhan masyarakat dalam konteks barang dan jasa serta pelayanan dibidang keadministrasian. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu mewujudkan kepuasan dari masyarakat, agar tidak terjadi penurunan kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah dan cenderung memutuskan untuk mengakses pelayanan melalui sektor lain, yakni sektor swasta.

2.2.2.2 Asas-Asas Pelayanan Publik

Ratminto dan Winarsih menyebutkan bahwa dalam penyediaan pelayanan publik organisasi sektor publik atau pemerintah perlu memperhatikan beberapa asas berikut ini:

bappelitbangda

a. Empati dengan *Customers* atau Pelanggan Pegawai atau staf yang memberikan pelayanan publik harus dapat berempati kepada warga atau masyarakat yang merupakan pengguna jasa pelayanan.
b. Pembatasan Prosedur. Prosedur harus dirancang sesingkat mungkin, sehingga pelayanan bagi masyarakat dapat disampaikan secara cepat dan segera.
c. Kejelasan Tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus dirancang sesederhana mungkin dan dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat penggunan jasa pelayanan.
d. Minimilasi Persyaratan Pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
e. Kejelasan Kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat penggunan jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
f. Transparansi Biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin. Selain itu perlu ada transparani mengenai biaya pembayaran kepada pelanggan atau masyarakat.
g. Kepastian durasi layanan Layanan harus memiliki durasi dan jadwal yang pasti, sehingga masyarakat memiliki kejalsan informasi dalam mengakses pelayanan.
h. Minimalisasi Formulir Formulir-formulir harus diminimalisir dan bersifat efisien. Apabila perlu formulir dapat berupa komposit atau satu formulir untuk banyak keperluan.

2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Penyediaan pelayanan publik perlu mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Sujardi memaparkan beberapa prinsip penyediaan pelayanan publik sebagai berikut ini:

a. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat dan mudah.
b. Kejelasan
    - Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
    - Memiliki pegawai yang profesional, bertanggung jawab dalam menangani keluhan dan persoalan yang dialami dalam proses pelayanan.

bappelitbangda

- Terdapat rincian biaya dan alur atau tata cara pembayaran. Kepastian san tepat waktu dalam penyediaan pelayanan.

c. Akurasi. Produk layanan yang diberikan harus diterima oleh masyarakat secara benar, tepat, dan sah.
d. Pelayanan tidak diskriminatif. Pelayanan dilakukan dengan tidak melakukan pembedaan pada aspek suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
e. Kemudahan Akses Tempat atau lokasi serta sarana fasilitas layanan harus memadai dan mudah jingkau oleh masyarakat. Aspek ini dapat juga memanfaatkan teknologi informasi.
f. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peraltan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk ketersediaan teknologi informasi penunjang layanan.
g. Kejujuran. Penyedia pelayanan publik harus bersikap jujur kepada para pelanggan atau masyarakat penerima layanan.
h. Kecermatan. Pelayanan publik harus dilakukan sengan penuh kehati hatian, teliti, dan telaten.

2.2.2.4 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik harus memiliki suatu standar sebagai acuan dan panduan dalam pelayanan. Standar pelayanan publik perlu disosialisasikan atau dipublikasikan agar publik atau masyarakat dapat mengetahui mengenai proses dan bentuk pelayanan publik yang disediakan. Standar pelayanan publik merujuk pada suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyedia layanan publik sehingga dalam pelaksanaannya wajib dipatuhi oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Surjadi standar pelayajan publik, sekurangkurangnya meliputi:

a. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan berlaku bagi pemberi dan penerima pelayanan serta termasuk proses pengaduan.
b. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya Pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
d. Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

bappelitbangda

e. Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat dan sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

.

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 3

GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP INOVASI
"Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat"

BAB - 3

GAMBARAN UMUM KAB. BANDUNG BARAT

3.1 Kondisi Fisik dan Kependudukan

Kabupaten Bandung Barat adalah wilayah pemekaran Kabupaten Bandung, yang pembentukannya diwacanakannya sejak tahun 1999. Walaupun demikian baru pada tanggal 2 Januari 2007 secara formal dan legal menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan terbitnya UU No.12/2007. Undang-undang ini menetapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat mencakup wilayah 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Gununghalu. Pada Tahun 2011, terdapat penambahan 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Saguling hasil pemekaran dari Kecamatan Batujajar. Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat adalah:

- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Luas wilayah Kabuapten Bandung Barat mengalami perubahan dari semula 1.305,774 Km2 atau 130.577,4 Ha menjadi 1.284,67 Km2 atau 128.467 Ha. Perubahan luas tersebut terbagi di dalam beberapa wilayah Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini:

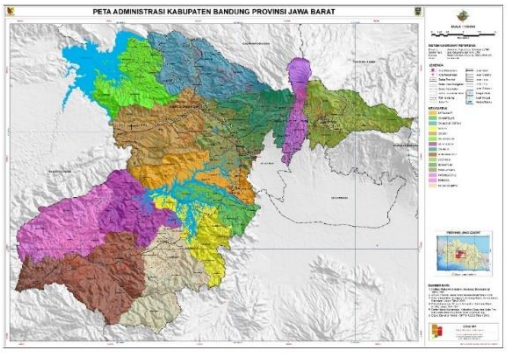
bappelitbangda

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Sebelum dan Setelah Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sebelum Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km^2)**
Batujajar	32,04
Cihampelas	46,99
Cikalongwetan	112,93
Cililin	77,79
Cipatat	126,05
Cipeundeuy	101,09
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,11
Gununghalu	160,64
Lembang	95,56
Ngamprah	36,01
Padalarang	51,4
Parongpong	45,15
Rongga	113,12
Saguling	51,46
Sindangkerta	120,47
Kab. Bandung Barat	**1305,77**

Sesudah Perubahan	
Kecamatan	**Luas Wilayah (Km^2)**
Batujajar	31,06
Cihampelas	46,95
Cikalongwetan	110,72
Cililin	77,68
Cipatat	125,68
Cipeundeuy	101,96
Cipongkor	79,96
Cisarua	55,54
Gununghalu	155,08
Lembang	98,11
Ngamprah	35,58
Padalarang	51,54
Parongpong	44,96
Rongga	112,34
Saguling	51,47
Sindangkerta	106,07
Kab. Bandung Barat	**1284,7**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.



Gambar 3. 1 Peta Admiistrasi Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Secara astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73' LS sampai dengan 07o1,031' LS dan secara topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2 .500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66,57% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 3. 2 Jumlah Pendudukan Di Kabupaten Bandung Barat 2020-2021

Kecamatan *Subdistrict*	Penduduk (ribu) *Population (thousand)*		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 *Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021*	
	2020[1]	2021[2]	2020[1]	2021[2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rongga	60 666	61 507	0,15	1,59
Gununghalu	79 175	80 135	0,14	1,42
Sindangkerta	73 458	74 604	0,11	1,77
Cililin	95 470	96 892	0,06	1,7
Cihampelas	132 659	135 732	0,07	2,53
Cipongkor	99 991	101 744	0,11	1,96
Batujajar	107 835	109 877	0,07	2,1
Saguling	33 820	34 461	0,08	2,1
Cipatat	140 301	142 221	0,04	1,58
Padalarang	181 359	183 700	0,03	1,5
Ngamprah	177 690	179 782	0,05	1,38
Parongpong	113 005	114 372	0,08	1,42
Lembang	197 640	199 756	0,07	1,28
Cisarua	79 154	80 298	0,06	1,65
Cikalong Wetan	128 106	129 919	0,09	1,62
Cipeundeuy	88 007	89 226	0,07	1,59
Bandung Barat	**1 788 336**	**1 814 226**	**0,07**	**1,65**

Sumber : *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022*

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 1.788.336 jiwa. Ada peningkatan jumlah penduduk yang cukup dignifikan di tahun 2021 mencapai 1.814.226 jiwa terjadi pertumbuhan penduduk sebanyak 1,6%.

3.2 Kondisi Inovasi

1. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan umum terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketrsediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu pertumbuhan ekonomi wilayah mapuan kondisi sosial budaya keehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan perkembangan kondisi jalan yang baik. Infrastruktur yang baik menjadi modal utama masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Peningkatan pelayanan jalan terus dilakukan. Secara akumulatif kondisi jalan terbagi menjadi kondisi rusak, kondisi sedang dan kondisi baik. Berikut gambaran proporsi kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat dal kurun waktu 2015- 2020.

Tabel 3. 3 Kondisi Jalan Bandung Barat Tahun 2015- 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Baik (km)	276,32	259,897	308,05	343,87	342,61	318,62
Kondisi Sedang (km)	76,55	50,162	21,18	45,50	37,76	88,70
Kondisi Rusak Ringan (km)	73,25	52,170	65,27	54,80	86,44	2,18
Kondisi Rusak Berat (km)	127,53	104,866	123,57	81,00	58,75	116,08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021

Jaringan Irigasi

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, jumlah jaringan irigasi di daerah irigasi dengan jumlah irigasi tahun 2020 sebanyak 6.477 (ha).

Tabel 3. 4 Jaringan Irigasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 - 2020

No	Jenis Irigasi	Potensi Area Sawah yang Terairi (ha)	Realisasi Rehab Jaringan Irigasi						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi teknis	6.447 ha	84 DI	135 DI	96 DI	118 DI	52 DI	75 DI	7 DI

bappelitbangda

2	Irigasi semi teknis	5.620 ha							
3	Irigasi sederhana	22.178 ha							
Jumlah		34.245 ha							

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021

Presentase Rumah Tangga pengguna Air Minum Bersih dan Air minum yang layak.

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotarumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 telah mencapai lebih dari 90 persen. Proporsi pemakaian air minum menurut sumbernya dalam penggunaan air bersih di Kabupaten Bandung Barat, bahwa penggunaan sumber air minum dari sumur terlindung masih mendominasi, diikuti oleh air ledeng/air kemasan, namun yang harus menjadi perhatian adalah masihtingginya penggunaan air tidak bersih.

Perumahan

Kualitas lingkungan perumahan akan menjadi perhatian utama dalam urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Capaian rumah tangga yang baik meliputi rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi, rumah layah huni. Cakupan Rumah tangga yang pengguna air bersih di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebesar 285.459, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebsar 308.783. Sedangkan data rumah yang bersanitasi pada tahun 2020 sebesar 61,18%. Selain daripada itu, salah satu indikator kualitas hidup masyarakat dalam bidang perumahan yaitu rasio rumah layak huni. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Berikut gambaran rasio rumah layak huni di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014 - 2020.

bappelitbangda

Tabel 3. 5 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014- 2020

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Layak Huni	39,30	40,84	42,74	43,44	25,386	N/A	N/A

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, 2021

Penataan Ruang

Proporsi capaian urusan penataan ruang terdiri dari capaian rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah HPL/ HGB terealisasi 16 % dan rasio bangunan ber IMB terealisasi 274 usulan dari 500 usulan yang masuk. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrument peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukup.

2. Lingkungan Hidup

Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sertamenjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan data terakhir keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari presentase penanganan sampah. Persampahan menjadi permasalahan di Wilayah Bandung Barat. Salah satu permasalahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Presentase penanganan sampah ini tentunya berkaitan dengan tersedianya tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pengangkutan sampah ke TPA tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat dengan rata-rata tonase harian terangkut sebesar 161.345 ton per hari.

Tabel 3. 6 Presentase Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015- 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase Penanganan Sampah	10,50	11	22,43	12	12	14

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021

Selain itu, urusan lingkungan hidup yang menjadi indikator tercapainya keberhasilan bidang ini adalah presentase trsedianya akses air minum yang memadai. Salah satu indikator syarat air minum menurut kementrian kesehatan yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Untuk menghitung presentase penduduk berkases air bersih dapat dilihat pada tabel sebagi berikut:

bappelitbangda

Tabel 3. 7 Presentase Tersedianya Akses Air Minum yang Memadai di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase Penduduk Berakses Air Minum	36,5	37	50,53	61,75	62,75	65,50

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021

3. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukungoleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan. Potensi daya tarik wisata maupun budaya yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat menjadi suatu aktivitas bernilai ekonomi tinggi. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada beberapa obyek wisata yang sudah terkelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Jumlah junjungan wisatawan, baik wisatawan local maupun mancanegara ke Bandung Barat semakin mengalami peningkatan. Seperti tampak pada tabel sebagi berikut:

Tabel 3. 8 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Mancanegara	35.948	144.372	24.685
Nusantara	6.588.203	6.386.654	4.064.126
Total	6.624.151	6.531.026	4.088.811

Sumber :Disbudpar Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2021

Dari data diatas menunjukan bahwa walaupun jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat sudah banyak yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat akan tetapi akibat dari Pandemi Covid19 ini menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disebabkan karena adanya protokol Kesehatan ketat yang dilakukan, agar dapat mengembalikan Kembali gairah wisata Bandung Barat

bappelitbangda

perlu menjalin kemitraan kerjasama dengan pihak pers untuk kepentingan kepariwisataan, peningkatan kerja sama dengan stakeholder didalam maupaun di luar negerei dan ddukung dengan berbagai event atau kegiatan. Kunjungan wisatawan ini dapat berkontribusi pada nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 yang berkontribusi dari sektor penyediaan Akomodasi dan Makan minum sebesar - 4,67%

Potensi Seni Budaya.

Seni budaya daerah adalah investasi masa depan bagi seluruh hajat hidup kemaslahatan umat manusia. Seni dan Budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai dalah satu kabupaten yang kaya akan seni dan budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pemangku kepentingan lainya untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya maka dilakukan pendataan sebagai potensi seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Potensi Seni dan Budaya di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Uraian	2019	2020
Jumlah Lingkung Seni	188	212
Jumlah Seniman	8381	N/A

Sumber : Disbudpar Kabupaten Bandung Barat, 2020

4. Ketenagakerjaan

Daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka berdampak positif yaitu dapat menghasilkan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan. Namun di sisi lain dengan pertambahan penduduk yang pesat menimbulkan dampak negatif jika tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja sehingga dapat memicu peningkatan pengangguran. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 menunjukan peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 747.664 sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 500.257 yang meliputi pekerjaan sekolah, menguruh rumah tangga, dan lainya. Hal ini dapat dilihat pula dari komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sektor lainya. Dengan total penduduk usia kerja pada tahun 2020 adalah 1.247.921 jiwa.

bappelitbangda

5. **Sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat kelembagaan sosial. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), saat ini berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Capaian urusan sosial dapat dilihat dari sarana sosial seperti panti asuhan 44 buah, panti jompo 9 buah dan panti sosial penyandang cacat 3 buah, keluarga miskin yang tertangani sebanyak 427.414 jiwa serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 428.495 pada tahun 2020. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan terhadap kesejahteraan sosial cukup meningkat dari tahun sebelumnya.

Selain itu terdapat Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat terus ditingkat sebanding dengan semakin tingginya standar pengeluaran penduduk. Namun demikian dengan garis kemiskinan yang semakin tinggi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat semakin rendah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 – 2020

Tahun	Garis kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2015	275.327	205.690	12,67%
2016	294.823	192.480	11,71%
2017	309.304	190.890	11,49%
2018	329.415	169,00	10.06%
2019	341.307	159,03	9.38%
2020	362.212	179,50	10.49%

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

6. **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.**

Penciptaan kondisi yang kondusif dan bantuan pengembangan usaha kecil menengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi sektor

bpplitbangda

ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Upaya tersebut mendorong terjadinya peningkatan capaian indikator bidang koperasi dan UKM yang terdiri dari jumlah unit usaha dan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data yang ada, setiap tahunnya baik jumlah unit usaha maupun unit koperasi selalu mengalami peningkatan dan memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, capaian RPJMD akhir periode tahun 2018-2023 dengan jumlah koperasi sebanyak 692 dengan koperasi yang aktif 426 dengan presentase koperasi yang masih aktif pada tahun 2019 sebesa 61,56 %. Jumlah UKM non yang belum memiliki IUM 12.059, jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina sebanyak 14.917

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 4

METODE KAJIAN

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP INOVASI
"Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat"

BAB - 4

METODE KAJIAN

4.1 Kerangka Pemikiran

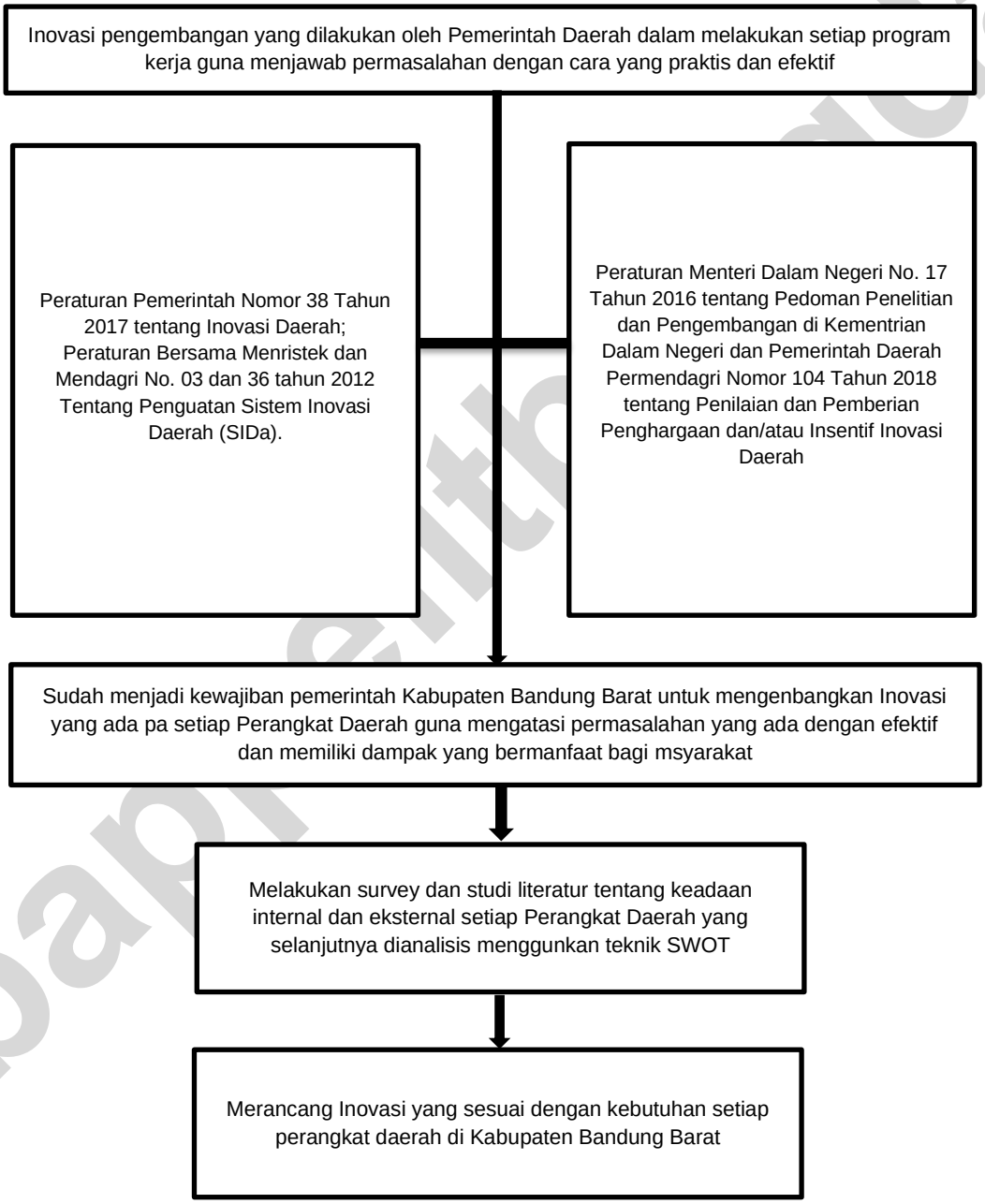
Pengembangan inovasi daerah menjadi sesuatu hal yang mutlak dilakukan oleh setiap Pemerintah daerah dalam menjawab dan mengatasi setiap permasalahan yang ada. Urgensi tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Konsepsi ini lahir seiring dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi problemagunan. Cara-cara baru ini membuat proses menjadi efektif, memangkas prosedur yang tidak diperlukan dan hanya memakan anggaran, membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang, dan yang paling penting tujuan yang didambakan tercapai dengan gemilang. Oleh karenanya, inovasi merupakan sesuatu yang berperan penting dalam otonomi, sebab secara langsung maupun tidak langsung dia mampu menjadi jalan pintas kemajuan. Apabila otonomi merupakan kondisi yang tidak boleh tidak dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, maka inovasi juga sesuatu yang harus dilakukan daerah. Sayangnya, dalam perjalanan otonomi bangsa ini, praktik cerdas dalam pembangunan masih amat jarang terdengar kabar beritanya. Padahal otonomi yang merupakan wadah terciptanya beragam inovasi, setidaknya memaksa Pemerintah Daerah dan masyarakatnya untuk berkreasi lebih nyata.

Untuk mendorong inovasi daerah, Pemerintah Daerah selain perlu menyiapkan kelembagaan, sistem, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai aktor utama Pembangunan juga harus dapat menciptakan dan mengembangkan konsep yang dapat menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demkian, Pemerintah Daerah harus kreatif sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam melahirkan ide-ide baru yang dapat mendorong aktivitas ekonominya. Diyakini jika pengembangan inovasi daerah akan melahirkan aparatur Pemerintah Daerah serta masyarakat yang inovatif, dan berani membuat terobosan namun tetap dalam koridor hukum.

bappelitbangda

Menurut Tuerah (2010), sebagai bagian dari inovasi, kreativitas yang diciptakan dan dikembangkan oleh daerah pada hakekatnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung, perumusan Peraturan Daerah mendorong pengembangan ekonomi daerah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, industri pariwisata berbasis sumberdaya, budaya, dan komunitas lokal, dan promosi daerah bersama untuk menarik lebih banyak wisatawan dan investor masuk ke daerah. Semua kegiatan ini adalah bagian dari inovasi daerah untuk mendorong dan mempercepat pembangunan daerah yang saat ini sangat ketat bersaing dengan daerah lain di dalam negeri dan luar negeri.



Gambar 4. 1 Kerangka Pemikiran

bappelitbangda

4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun kebutuhan data, metode pengumpulan data dan sumber data untuk pekerjaan Kajian Rancangan Inovasi Daerah di Kabupaten Bandung Barat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kebutuhan Data Primer Kegiatan

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Program yang telah dijalankan	Survey Lapangan	Dinas Koprasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Ngamprah
2.	Permasalahan Institusi dalam Pengembangan Inovasi	Survey Lapangan	Dinas Koprasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Ngamprah
3.	Program Inovasi Yang diharapkan Institusi	Survey Lapangan	Dinas Koprasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Ngamprah

Tabel 4.2 Kebutuhan Data Sekunder Kegiatan

No.	Kebutuhan Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Kondisi Insternal Institusi	Studi Literatur	LKPJ Tahun 2021, RPJMD 2019-2023
2.	Kondisi Eksternal Institusi	Studi Literatur	LKPJ Tahun 2021, RPJMD 2019-2023

4.3 Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *R&D/Research and Development*. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg and Gall "*research and development is a powerful strategy for improving practice. It is a process used to develop and validate*

bapperlitbangda

educational products." Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa "penenelitian dan pengembangan merupakan strategi yang kuat untuk meningkatkan praktek. Itu adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan." Produk pendidikan yang dimaksud dalam penelitian dan pengembangan mengandung empat pengertian pokok. Pertama, produk tersebut tidak hanya meliputi perangkat keras, seperti modul, buku teks, video dan film pembelajaran atau perangkat keras yang sejenisnya, tetapi juga perangkat lunak seperti kurikulum, evaluasi, model pembelajaran, prosedur dan proses pembelajaran, dan lain-lain. Kedua, produk tersebut dapat berarti produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Ketiga, produk yang dikembangkan merupakan produk yang betul-betul bermanfaat bagi dunia pendidikan. Keempat, produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara praktis maupun keilmuan.

Pengembangan atau *Research and Development (R&D)* adalah suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Pengertian pengembangan menurut Amile and Reesnes, R&D merupakan suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. *Research and Development* (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan untuk menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria dari produk yang dibuat sehingga menghasilkan produk yang baru melalui berbagai tahapan dan validasi atau pengujian.

Tujuan Penelitian pengembangan *Research and Development* (R&D) bertujuan menghasilkan suatu produk, perlu diadakan need assessment. R&D tujuan utamnya tidak keluar dari lingkup:

a. Perumusan teori-teori atau konsep-konsep baru kependidikan, b. Memperbaiki teori-teori ataupun konsep-konsep pendidikan yang telah ada,
b. Menguji atau memverifikasi aplikasi dari berbagai teori ataupun konsep pendidikan dalam praktik di lapangan,
c. Merumuskan sejarah pendidikan,
d. Menguji keefektifan suatu konsep atau perangkat pendidikan, dan
e. Menemukan berbagai kelemahan dari berbagai teori, konsep ataupun praktik kependidikan, serta mencari berbagai cara memperbaikinya.

bappelitbangda

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian pengembangan yakni untuk menghasilkan suatu produk melalui proses menguji atau memverifikasi sehingga menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif.

Model Pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan penelitian 4D. Menurut (Thiagarajan, 1974) terdiri dari empat tahap pengembangan. Tahap pertama Define atau sering disebut sebagai tahap analisis kebutuhan, tahap kedua adalah Design yaitu menyiapkan kerangka konseptual model dan perangkat pembelajaran, lalu tahap ketiga Develop, yaitu tahap pengembangan melibatkan uji validasi atau menilai kelayakan media, dan terakhir adalah tahap Disseminate, yaitu implementasi pada sasaran sesungguhnya yaitu subjek penelitian.



Gambar 4. 2 Langkah Pengembangan 4D

Adapun rincian tahapan pengembangan sebagai berikut:

1. Tahap *Define* (Pendefinisian)

Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait sayarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembang perlu mengacu kepada syarat pengembangan, manganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap

penelitian terdahulu dan studi literatur. (Thiagarajan, 1974) menyebut ada lima kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define, yakni meliputi:

a. *Front-end Analysis* (Analisa Awal) Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatarbelakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisis awal peneliti/pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalan menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan.
b. *Learner Analysis* (Analisa Peserta Didik) Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa.
c. *Task Analysis* (Analisa Tugas) Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam hal ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan.
d. *Concept Analysis* (Analisa Konsep) Dalam analisa konsep dilakukan identifkasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional.
e. *Specifying Instructional Objectives* (Perumusan Tujuan Pembelajaran) Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep (concept analysis) dan analisa tugas (task analysis) untuk menentukan perilaku objek penelitian.

2. Tahap *Design* (Perancangan)

Tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan (*design*). Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini yakni constructing criterion-referenced test (penyusunan standar tes), *media selection* (pemilihan media), *format selection* (pemilihan format), dan *initial design* (rancangan awal).

a. *Constructing Criterion-Referenced Test* (Penyusunan Standar Tes) Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahappendefinisan dengan

bappelitbangda

tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat penduan penskoran dan kunci jawaban soal.

b. *Media Selection* (Pemilihan Media) Secara garis besar pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai/relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembanan bahan ajar pada proses pembelajaran.
c. *Format Selection* (Pemilihan Format) Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran.
d. *Initial Design* (Rancangan Awal) Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum ujicoba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktifitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar (Microteaching).

3. Tahap *Develop* (Pengembangan)

Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan (*develop*). Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah yaitu *expert appraisal* (penilaian ahli) yang disertai revisi dan delopmental testing (uji coba pengembangan).

A. *Expert Appraisal* (Penilaian Ahli). *Expert appraisal* merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi. Dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi.

B. *Delopmental Testing* (Uji Coba Pengembangan). Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi,

bappelitbangda

komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten.

4. Tahap *Disseminate* (Penyebarluasan)

Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebarluasan. Tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan adar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Terdapat tiga tahap utama dalam tahap disseminate yakni validation testing, packaging, serta diffusion and adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan.

Selanjutnya setelah diterapkan, peneliti/pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan, tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Pada tahap packaging serta diffusion and adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap (difusi) atau dipahami orang lain dan dapat digunakan (diadopsi) pada kelas mereka.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalm melaksanakan diseminasi/penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Kelebihan model 4D yaitu tidak membutuhkan waktu yang realtif lama, karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks. Kelemahan Model 4D yaitu di dalam model 4D hanya sampai pada tahapan penyebaran saja, dan tidak ada evaluasi, dimana evaluasi yang dimaksud adalah mengukur kualitas produk yang telah diujikan, uji kualitas produk dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk.

Salah satu teknik yang digunakan dalam analisis data pada kajian ini adalah analisis SWOT, yang didasarkan pada penentuan perpaduan antara faktor internal dan eksternal. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan *Eksternal Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weaknesses*). Hasil dari analisis swot yang telah dilakukan, akan melahirkan dua keadaan yang menggambarkan strategi yang yang harus dilakukan

bappelitbangda

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat



2022

BAB 5

HASIL KAJIAN

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP INOVASI
"Rancangan Inovasi di Kabupaten Bandung Barat"

BAB - 5

ANALISIS HASIL

5.1 Analisis SWOT

5.1.1 Analisis Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil studi literatur dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan terhadap beberapa perangkat daerah yaitu Bappelitbangda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Migrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM dan Perangkat Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), diperoleh data kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah dalam melakukan Inovasi. Untuk lebih jelasnya, kekuatan KBB dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Hasil Analisis Kekuatan Kabupaten Bandung Barat

No	Kekuatan (*Strengths*)
S1	Posisi Kabupaten Bandung Barat strategis, dekat dengan Kota Bandung dan dilalui jalan tol Jakarta-Bandung
S2	Memiliki banyak objek wisata
S3	Memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan ekonomi
S4	Adanya kesadaran aparatur, masyarakat bahwa Kabupaten Bandung barat dapat berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat

5.1.2 Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Selain Kekuatan, kelemahan merupakan unsur yang harus dicari untuk mengetahui kondisi internal di KBB dalam melakukan inovasi. Berdasarkan hasil studi literatur dan FGD dengan beberapa kelembagaan di KBB, diperoleh data kelemahan KBB sepeti pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 2 Hasil Analisis Kelemahan Kabupaten Bandung Barat

No	Kelemahan (*Weakness*)
W1	Pelayanan publik belum maksimal
W2	Pemberdayaan masyarakat masih terkendala
W3	Partisipasi publik masih minim
W4	Daya saing daerah belum muncul ke permukaan
W5	Dana tidak memadai untuk menopang pembangunan daerah

bappelitbangda

5.1.3 Analisis Peluang (*Opportunities*)

Disamping kondisi internal, dalam menyusun sebuah strategi juga diperlukan kondisi eksternal di KBB dalam melakukan Inovasi. Kedua kondisi tersebut perlu diketahui agar inovasi yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan disetiap perangkat dinas KBB. Kondisi eksternal tersebut salah satunya adalah peluang. Berdasarkan hasil studi literatur dan FGD yang telah dilakukan, diperolah data peluang KBB dalam melakukan inovasi seperti terlihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5. 3 Hasil Analisis Peluang Kabupaten Bandung Barat

No	Peluang (*Opportunities*)
O1	Kota Bandung, sebagai Ibukota Propinsi Jawa Barat menjadi trigger pada Kabupaten Bandung Barat untuk berkembang
O2	Adanya dana CSR yang dapat ditarik ke Kabupaten Bandung Barat
O3	Tersedia kepakaran di sekitar Kota Bandung yang bersumber dari PTN/PTS kredibel
O4	Banyaknya perusahaan dalam dan luar negeri yang siap berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat
O5	Adanya kereta api cepat Jakarta-Bandung
O6	Meredanya Covid-19

5.1.4 Analisis Ancaman (*Threats*)

Selain peluang, kondisi eksternal lain yang harus diketahui dalam menyusun sebuah inovasi adalah ancaman. Berdasarkan studi literatur hasil dan FGD dengan beberapa perangkat daerah di KBB, diperoleh beberapa poin ancaman yang disajikan pada Tabel 5.4..

Tabel 5. 4 Hasil Analisis Ancaman Kabupaten Bandung Barat

No	Ancaman (*Threats*)
T1	Daerah (Kab./Kota) berlomba untuk meningkatkan fasilitas (destinasi) wisatanya untuk menarik wisatawan
T2	Dana CSR BUMN/D/S diperebutkan banyak daerah
T3	Inflasi
T4	Daya tarik Kabupaten/Kota lain, sehingga terjadi *brain drain*, berpindahnya SDM kompeten Kabupaten Bandung Barat ke daerah lain

5.1.5 Strategi Kombinasi

a. Fokus pada **Kekuatan – Peluang (S-O)**

1. Dengan posisi yang strategis dan lahan luas serta objek wisata yang dimilikinya, KBB berupaya mencari investor dalam dan luar negri untuk mengembangkan KBB

bappelitbangda

2. Kesadaran aparatur – masyarakat terkait potensi KBB diharapkan untuk mencari kepakaran guna melahirkan inovasi-inovasi peningkat kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan potensi dan kesadaran aparatur serta masyarakat, KBB dapat menarik CSR dan investasi serta memanfaatkan adanya kereta api cepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Fokus pada **Kelemahan – Peluang (W-O)**

1. KBB harus meningkatkan pelayanan public; pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan daya saing daerah guna menarik manfaatnya adanya kereta api cepat yang melalui KBB dan melimpahnya pembangunan/investasi dari kota Bandung ke KBB, serta memanfaatkan kepakaran yang bersumber dari PTN/PTS.
2. KBB harus merancang program untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat memanfaatkan situais yang membaik karena meredanya pandemic Covid.
3. KBB harus meningkatkan daya saing daerah dan merancang program yang hemat anggaran untuk menarik dana CSR dari investor

c. Fokus pada **Kekuatan - Ancaman (S-T)**

1. Dengan posisi georgrafisnya, banyaknya objek wisata dan potensi lahan yang luas, KBB berupaya menarik dana CSR dan mencegah terjadinya *brain drain*.
2. Kesadaran aparatur dan masyarakat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan menyiasati inflasi serta menarik dana CSR ke KBB.

d. Fokus pada **Kelemahan – Ancaman (W-T)**

1. KBB harus meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk menekan terjadinya *brain drain* dan antisipasi dampak inflasi.
2. KBB harus meningkatkan daya saing daerah dan menekan angka kemiskinan, untuk mendapatkan dana CSR dan menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

e. Strategi yang dipilih untuk diterapkan

1. Dengan posisinya yang strategis dan memiliki banyak potensi, KBB harus berupaya menarik investor dan dana CSR serta memanfaatkan keberadaan Kereta Api cepat.

bappelitbangda

2. KBB harus melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan layanan public – pemberdayaan – partisipasi dan daya saing daerah dan menekan angka kemiskinan
3. Dengan posisi geografisnya dan potensi yang dimilliki, KBB harus berupaya mencegah *brain drain* dan menyiasati inflasi.

5.2 Inovasi yang Diusulkan

5.2.1 Inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)

a. Aplikasi PEJOL

Aplikasi PEJOL merupakan aplikasi pelayanan publik yang masuk dalam kategori tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini dapat mengefisiensikan kerja pada tata kelola pemerintahan seperti mudahnya mendapatkan aspirasi publik, biaya survey menjadi lebih efisien, serta mencegah terjadinya komplain masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Aplikasi PEJOL ini bertujuan untuk mengefisiensikan tenaga dan biaya dalam melakukan survey, terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam melakukan laporan, munculnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dapat mengurangi kecelakaan, dan dapat terhindar dari pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aplikasi PEJOL ini merupakan pengembangan aplikasi pengaduan jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Namun dalam Aplikasi PEJOL yang dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (PUTR) ini tidak hanya kerusakan jalan dan jembatan saja yang dapat dilaporkan, tetapi juga ketidaknyamanan pengguna jalan terkait kondisi jalan dengan meyertakan lokasi serta beberapa foto kerusakan dan ketidaknyamanan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam implementasi aplikasi PEJOL ini diantaranya masyarakat dimudahkan dalam melakukan pengaduan, serta pengaduan masyarakat lebih cepat ditangani oleh pihak PUTR. Pengembangan aplikasi ini melibatkan beberapa pihak diantaranya Dinas PUTR sebagai perancang aplikasi PEJOL bersama Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memasukan kedalam aplikasi induk dan melakukan sosialisasi, Bappelitbanda yang merancang dan menyantumkan anggaran RAPBD, Sekretariat Daerah melakukan finalisasi anggaran, dan Bupati melakukan pengesahan dan pengusulan. Juga DPRD yang berperan dalam pengesahan anggaran, dan non-Pemerintahan yakni masyarakat umum dan khusus seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

bappelitbangda

1. Tujuan Inovasi

Instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pembangunan jalan dan jembatan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal dan mudah diakses oleh masyarakat, Dinas PUTR akan meluncurkan inovasi berupa aplikasi pengaduan kondisi jalan yang diberi nama Pengaduan Jalan Online (PEJOL). Adapun tujuan dibuatnya inovasi ini adalah:

a. Memudahkan dan mengefisiensikan waktu yang dilakukan oleh Dinas PUTR dalam menerima laporan masyarakat.
b. Mengurangi biaya dalam melakukan survey yang dilakukan oleh Dinas PUTR.
c. Memberikan keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Bandung Barat dalam menerima/menggunakan fasilitas jalan raya.
d. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
e. Mengurangi kecelakaan pengguna jalan.
f. Menghidari jeratan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih

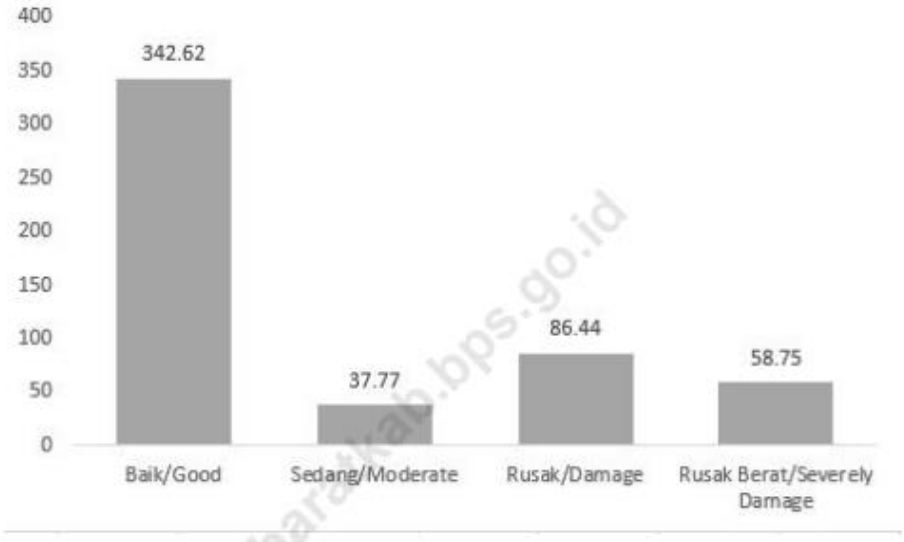
Kategori yang dipilih yakni Tata Kelola Pemerintahan. Dalam Pengelolaan Pemeritahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan bahwa tata pengelolaan pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, artinya Pada pelaksanaannya unsur sarana dan prasarana serta fasilitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan dapat memenuhi pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam menginput data, mengefisiensikan waktu pelayanan, dan lain sebagainya.

Untuk pengimplementasian penyerapan aspirasi publik, efisiensi dalam dalam melakukan pelayanan, serta terhindarnya pemerintahan dari komplain masyarakat, Dinas PUTR mengeluarkan sebuah inovasi yang diberi nama “PEJOL” Pengaduan Jalan Online untuk membantu seluruh masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap jalan-jalan dan jembatan yang rusak dan tidak nyaman secara online sehingga seluruh kalangan dapat melakukan pengaduan tersebut dengan mudah.

3. Signifikansi

Pada Tahun 2020 jalanan di Kabupaten Bandung Barat yang masih dalam kondisi rusak masih cukup banyak. BPS menyatakan bahwa panjang jalanan rusak dan rusak berat terdapat 145,19 KM seperti yang dijelaskan oleh Gambar 1.1.

bappelitbangda



Gambar 5.1 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung Barat (km), 2020

Masalah kerusakan jalan raya dianataranya akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan jalan aspal terpecah, jalan berlubang, kualitas jalan yang tidak sebanding dengan tekanan gandar kendaraan, serta adanya pergeseran kontur tanah. Jalan yang rusak tersebut dapat mengakibat beberapa kendala seperti meningkatnya pengeluaran masyarakat karena jalan macet, rusaknya lingkungan hidup (pencemaran), waktu masyarakat dapat terbuang akibat jalan rusak, serta mengakibatkan citra pemerintahan turun di mata masyarakat.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh dinas PUTR untuk memberikan pelayanan publik terbaik dalam melakukan pengaduan jalan. Aplikasi PEJOL ini sangat berperan penting untuk mengatasi kekurangan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas PUTR dalam melakukan perbaikan jalan, kurangnya tenaga dan teknologi dalam mengecek jalan yang rusak, dapat diatasi oleh PEJOL.

4. Inovatif

PEJOL" Pengaduan Jalan Online, merupakan inovasi rintisan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi yang serupa yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kabupaten Gresik. Inovasi yang ditawarkan oleh Dinas PUTR ini adalah bentuk pengaduan yang tidak hanya pada jalan rusak saja, tetapi bentuk ketidaknyamanan pengguna jalan juga dapat dilaporkan. Sebelumnya masyarakat sangat kesulitan untuk melakukan pengaduan terhadap jalanan yang rusak, dan setelah melakukan laporan kadangkala membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ditindak lanjuti oleh dinas PUTR. Inovasi ini memudahkan Dinas PUTR dalam mengecek jalan yang rusak dan melakukan tindak lanjut karena setiap laporan masyarakat, masyarakat dapat melihat perkembangan

bappelitbangda

pengaduan tersebut apakah sedang diproses atau belum. Dengan adanya Aplikasi PEJOL ini masyarakat tidap perlu datang ke kelurahan, kecamatan atau bahkan ke Dinas PUTR untuk melakukan pengaduan. Cukup di rumah atau di lokasi kejadian dapat dilakukan pengaduan secara langsung/online.

5. Transferabilitas

Strategi dalam melakukan revitalisasi pengaduan terhadap jalan yang rusak secara online menjadi sarana pengaduan yang cepat, tepat, dan mudah. Selain pengaduan dalam aplikasi dapat ditambah beberapa informasi terkait Dinas PUTR diantaranya :

a. Menambah fitur – fitur informasi terkait pekerjaan umum dan tata ruang dalam aplikasi PEJOL
b. Menambah fitur customer service dalam aplikasi PEJOL
c. Menambah fitur peta yang berisi titik-titik jalan yang sedang diperbaiki
d. Masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan mudah melalui layanan PEJOL.

6. Sumber Daya dan Berkelanjutan

A. Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan mencakup

1. Sumber daya manusia yang berasal dari
   a. Aparatur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
   b. Pengembang aplikasi (Pihak ke-3)
   c. Masyarakat
2. Sumber dana
   a. APBD

B. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan dapat terus dipertahankan keberadaanya sehingga inovasi yang diluncurkan yaitu *Aplikasi PEJOL* dapat terus berlanjut

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   SDM dapat terus dipertahankan keberadaanya, hanya saja partisipasi masyarakat dapat berganti orang.

2. Sumber Dana

   Dana APBD dapat terus dipertahankan selama manfaatnya dirasakan oleh pelaku masyarakat.

7. Dampak

Aplikasi PEJOL ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan secara online dan Dinas PUTR dapat bergerak cepat mengeksekusi pengaduan yang

bappelitbangda

telah masuk, selain itu masyarakat dapat mengecek apakah pengaduannya sudah diproses atau belum.

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan *PEJOL* di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a. Pengembangan gagasan

Pemangku kepentingan yang terlibat : Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

b. Formulasi :

- Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Dinas Komunikasi dan Informasi
- Pihak ke-3 (Pengembang aplikasi PEJOL)

c. Pelaksanaan :

- Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Dinas Komunikasi dan Informasi
- Pihak ke-3 (Pengembang aplikasi PEJOL)
- Organisasi Angkutan darat, dll
- Masyarakat

d. Monev :

- Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Organisasi Angkutan darat, dll
- Masyarakat

e. Revisi/Inovasi :

- Aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Konsultan

b. Inovasi Lain di PUTR

1. Sistem Informasi Pengaduan Infrastruktur (SINGATUR)

SINGATUR adalah aplikasi pengaduan infrastruktur melalui situs *laman web*. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi penyerap aspirasi dan laporan warga terkait permasalahan infrastruktur yang ada. Seperti air minum, drainase, irigasi, sungai, jalan, jembatan, jalan lingkung, kategori cipta karya (jalan perumahan dan bangunan) leges gambar, legalisasi aset tanah pemko, pengendalian dan pengawasan bangunan, pengujuan bahan material, hingga pengujian mutu.

bappelitbangda

Berdasarkan kategori pengaduan yang disediakan dalam aplikasi ini, masing-masing bidang di Dinas PUPR nanti akan menindaklanjuti laporan yang masuk, setelah itu setiap aksi yang dilakukan dinas atas laporan tersebut akan dikirimkan feed backnya (umpan balik) ke aplikasi SINGATUR serta email pelapor.

2. Inovasi KBB BERDIGIT

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dapat membuat inovasi berupa Inovasi berbasis Geographic Information System (GIS), memiliki tingkat akurasi tinggi serta mampu membantu percepatan keluarnya Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diajukan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Inovasi ini di inisiasi oleh keadaan KRK yang kadang tidak valid. Prosesnya, ketika masyarakat mengajukan KRK, petugas akan melakukan pengecekan lapangan secara manual, kemudian disalin berbasis digital. Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat memudahkan pelayanan dinas PUPR kepada masyarakat.

Sebelum di komersilkan kepada masyarakat inovasi ini harus di edukasi terlebih dahulu karena tidak semua orang paham tentang tata ruang wilayah. Pada KBB Berdigit, dijelaskan Fungsional Umum Bidang Tata Ruang, terdapat pola ruang berdasarkan warna. Di antaranya Hijau menunjukkan kawasan hutan lindung, atau Kuning kawasan perumahan rendah dsb.

5.2.2 Inovasi dari Dinas Sosial

1. Aplikasi SIMBASOS

Pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak mampu mencukupi keperluan sehari-hari juga meningkat. Masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin sehingga bantuan pemerintah sangat diharapkan. Bantuan pemerintah seperti PKH, BLT, PIP, dan sebagainya memerlukan data DTKS yang akurat dan komprehensif. Tidak akuratnya data menyebabkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat dan angka kemiskinan tetap tinggi. Untuk itu, Dinas Sosial akan mengeluarkan inovasi, yaitu sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Layanan Bantuan Sosial (SIMBASOS). Simbasos menghubungkan DTKS dengan data kependudukan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM. Inovasi ini bertujuan agar masyarakat dan pengurus RT hingga Kecamatan dapat melihat data penerima bantuan secara langsung serta petugas dapat mengupdate dan memvalidasi data penerima bantuan. Pihak-pihak yang akan berkontribusi dalam pengembangan aplikasi SIMBASOS di Kabupaten

bappelitbangda

Bandung Barat yaitu: Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappelitbangda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan mitra.

1. Tujuan Inovasi

Pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak mampu, mencukupi keperluan sehari-hari. Masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin. Bantuan pemerintah seperti PKH, BLT, PIP, dan sebagainya, memerlukan data yang akurat. Pengalaman menunjukkan, bantuan pemerintah sering diberikan pada kelompok masyarakat yang salah atau tepat sasaran karena kurangnya keakuratan data yang menjadi *data base* penerimaan bantuan dari pemerintah. Tidak akuratnya data merupakan faktor tertinggi ketidakpuasan masyarakat dan tidak tuntasnya pengentasan kemiskinan.

Inovasi ini bertujuan agar :

a. Aplikasi yang berbasis DTKS terhubung dengan basis data lain yang relevan seperti data kependudukan, data BPJS Kesehatan, data BPJS Ketenagakerjaan, data perbankan, data Covid (Peduli Lindungi), data BKKBN.
b. Menurunnya kasus kasus dalam penerimaan bansos seperti warga yang meninggal masih mendapat bantuan, warga yang pindah domisili, serta warga yang berubah Kartu Keluarga.
c. Kelompok masyarakat yang menerima bansos dapat melakukan verifikasi dan validasi data seperti manajemen sekolah dapat mencetak PIP/KIP, BOS dapat memverifikasi dan validasi berupa BPJS-PBI, RT-RW-kelurahan-kecamatan dapat mengakses data DTKS secara online melalui aplikasi SIMBASOS

2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih

Kategori yang dipilih yakni Pengentasan Kemiskinan. Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah mengamanatkan bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Disamping itu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023 yang juga menekankan terkait program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

bappelitbangda

usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk itulah Dinas Sosial mengeluarkan sebuah inovasi dalam melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan membuat aplikasi agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran, dan mampu terevaluasi oleh pihak yang berkepentingan.

3. Signifikansi

Berdasarkan data yang didapatkan dari *opendata.jabarprov.go.id*, Pada tahun 2020 Jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat mencapai 121.535 Jiwa. Dan ada peningkatan dari tahun 2019 yang hanya 77.972 jiwa. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas sosial untuk memberikan bantuan secara efisien.

Inovasi ini sangat berperan penting dalam mengatasi kelemahan data yang dimiliki oleh Dinas sosial terkait jumlah penerima bantuan di Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi simbasos akan menguntungkan DTKS dengan penghubungan terhadap data lain yang relevanDengan adanya inovasi ini penerima bantuan dapat terevaluasi layak atau tidaknya berdasarkan rekomendasi dari RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan setempat.

4. Inovasi

“SIMBASOS” Sistem Layanan Bantuan Sosial, merupakan inovasi lanjutan yang dilakukan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Namun dalam aplikasi ini yang dapat melihat bantuan adalah orang yang menerimanya saja, petugas setempat tidak mengetahui siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut serta mengecek apakah layak atau tidak. Inovasi ini memudahkan Dinas Sosial dalam mengecek dan mendata penerima bantuan sosial di Kabupaten Bandung Barat. Dan dengan adanya inovasi Simbasos ini petugas penyaluran bantuan tidak perlu lagi mendata dan melaporkan siapa-siapa saja yang layak menerima bantuan, cukup mengisi dan merekomendasikan dalam aplikasi dan persetujuan dari Dinas Sosial. Karena terhubungnya dengan pangkalan data lain maka data menjadi komprehensif RT-RW-Kelurahan-Kecamatan-sekolah dapat mengakses DTKS melalui aplikasi SIMBASOS.

5. Transferabilitas

Strategi dalam melakukan pengembangan bantuan sosial yang harus dilakukan Dinas sosial berbasis aplikasi yang dilakukan secara mandiri. Ini diadaptasi dari aplikasi yang sudah digunakan di Kabupaten Bandung. Selain data penerima bantuan tersebut dalam inovasi ini dapat ditambah beberapa informasi terkait Dinas sosial diantaranya :

a. Dapat memberikan informasi terkait dengan bantuan-bantuan apa saja yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat dan bagaimana cara untuk mendaftarnya

bappelitbangda

b. Menambah informasi database penerima bantuan agar bisa divalidasi oleh petugas setempat apakah masih layak atau tidak orang tersebut menerima bantuan
c. Menambah informasi terkait program-program dinas social dalam pengentasan kemiskinan dalam apliaksi SIMBASOS

Masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan mudah dalam penerimaan bantuan sosial. Masyarakat yang telah menerima bantuan sosial diharapkan dapat terbantu dan menjadi keluarga yang sejahtera.

6. Sumber Daya dan Berkelanjutan

A. Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan mencakup

1. Sumber daya manusia yang berasal dari
    a. Aparatur Dinas Sosial
    b. Pihak ke-3 (Pengembang aplikasi Simbasos)
    c. RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Aparat Desa
    d. Masyarakat
2. Sumber dana
    a. APBD

B. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan dapat terus dipertahankan keberadaanya sehingga inovasi yang diluncurkan yaitu *Aplikasi SIMBASOS* dapat terus berlanjut

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM dapat terus dipertahankan keberadaanya, hanya partisipasi masyarakat dapat berganti orang.

b. Sumber Dana

Dana APBD dapat terus dipertahankan selama manfaatnya dirasakan oleh pelaku masyarakat.

7. Dampak

Dampak yang diharapkan dibuatnya inovasi aplikasi SIMBASOS ini untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar bantuan secara online dan memudahkan petugas setempat untuk mengecek serta memvalidasi warga penerima bantuan sosial, Dinas Sosial dapat mengakuratkan data jumlah penerima bantuan di Kabupaten Bandung Barat, dan menghilangkan ketidakpuasan masyarakat atas ketidakakuratan data. Secara rinci dampak yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya keadilan dan rasa keadilan di masyarakat

bappelitbangda

b. Para pemangku kepentingan yang terlibat dapat mengakses simbasos dan mengetahui data penerima bantuan
c. Validasi dan verifikasi semua jenis bantuan dilakukan melalui aplikasi
d. Menurunya jumlah penerima bantuan karena maningkatnya kesejahteraan

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan *SIMBASOS* di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a. Pengembangan gagasan
Pemangku kepentingan yang terlibat : Aparat Dinas Sosial

b. Formulasi :
- Aparat Dinas Sosial
- Pihak ke-3 (Pengembang aplikasi SIMBASOS)
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Kesehatan

c. Pelaksanaan :
- Aparat Dinas Sosial
- Pihak ke-3 (Pengembang aplikasi SIMBASOS)
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Kesehatan
- Aparat di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Desa
- Masyarakat

d. Monev :
- Aparat Sosial
- Aparat di tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Desa
- Masyarakat

e. Revisi/Inovasi :
- Aparat Sosial
- Pihak ke-3 (Pengembang aplikasi SIMBASOS)

2. Inovasi lain di Dinas Sosial

Pusat Keseshatan Sosial (PUSKESOS)

Pusat Kesehatan Sosial (Puskesos) dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin di Desa/Kelurahan terkait untuk menjangkau layanan perlindungan

bappelitbangda

sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pemerintah Desa/Kelurahan dan Swasta/CSR. Dimana pemerintah Desa/Kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi aturan dan anggaran untuk pelaksanaan puskesos.

Dengan terbentuknya Puskesos Desa/Kelurahan dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat maka akan bersinergi antara Desa/Lurah dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat bersama OPD terkait dalam pendampingan permasalahan sosial di masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan akan tetap dilakukan proses evaluasi sehingga kedepannyan berjalan dengan efektif.
Kelompok sasaran Puskesos ini adalah:

- Warga miskin dan rentan mskin yang terdapat atau tidak terdapat dalam basis data terpadu yang dihasilkan melalui PBDT 2015 atau yang ada dalam basis data siskadasatu yang tinggal di Desa/Kelurahan setempat
- Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Desa/Kelurahan setempat
- Warga Desa/Kelurahan setempat lainnya yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Puskesos bertanggung jawab atas pelaksanaaan SLRT di Desa/Kelurahan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos melalui Alokasi Dana Desa atau Dana Desa
- Mendukung dan memfasilitasi pemuktahiran data penerima manfaat di tingkat Desa/Kelurahan
- Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kabupaten/Kota
- Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan rmiskin sesuai kapasitas Desa/Kelurahan
- Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan atau di Kabupaten/Kota melaui SLRT

5.2.3 Inovasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disnakertrans)

Pandemi Covid 19 membuat sektor ekonomi terpuruk. Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terjadi kenaikan jumlah pengangguran yang tinggi. Dibutuhkan pendataan

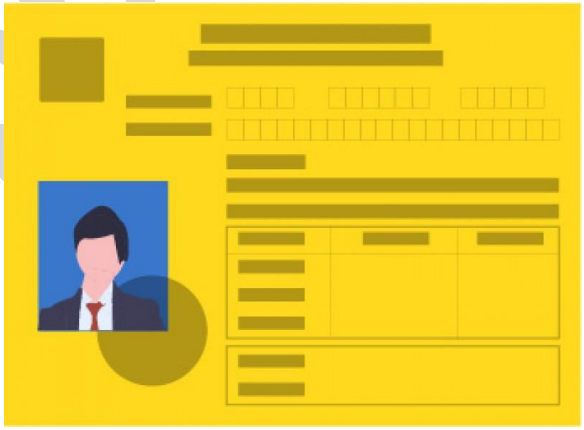
bappelitbangda

yang tepat untuk mengetahui besarnya jumlah pengangguran tersebut melalui Kartu Kuning (AK.1), sehingga dapat diketahui berapa jumlah pencari kerja. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Disnakertrans KBB berupaya membuat inovasi pengembangan dari pembuatan kartu kuning yang bisa di proses secara online dan pencetakan kartu kuning dapat dilakukan sendiri di rumah atau dapat dicetak di kantor atau kecamatan terdekat. Agar terhindar dari plagiasi pencetakan kartu kuning dapat ditambahkan ***Barcode*** untuk mengecek keabsahan kartu kuning tersebut. Dengan adanya inovasi ini para pencari kerja akan lebih efisien dalam membuat kartu kuning. Pihak-pihak yang akan berkontribusi dalam pengembangan pencetakan Kartu Kuning di Kabupaten Bandung Barat yaitu Bupati Bandung Barat, Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, dan Disnakertrans.

1. Tujuan Inovasi

Pandemi Covid 19 membuat sektor ekonomi terpuruk. Di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terjadi kenaikan jumlah pengangguran yang tinggi. Dibutuhkan pendataan yang tepat untuk mengetahui besarnya jumlah pengangguran tersebut melalui Kartu Kuning (AK.1), sehingga dapat diketahui berapa jumlah pencari kerja. Kartu Kuning (AK.1) adalah kartu yang diperuntukkan bagi pencari kerja. Kartu ini digunakan sebagai database Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat untuk mengetahui pencari kerja di wilayahnya.

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Disnakertrans KBB berupaya membuat inovasi pengembangan dari pembuatan kartu kuning yang bisa di proses secara online dan pencetakan kartu kuning dapat dilakukan sendiri di rumah atau dapat dicetak di kantor kecamatan terdekat. Dengan adanya inovasi ini para pencari kerja akan lebih efisien dalam membuat kartu kuning.



Gambar 5.2 Contoh Format Kartu Kuning

bappelitbangda

2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih

Kategori yang dipilih yakni Tata Kelola Pemerintahan. Dalam Pengelolaan Pemeritahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan bahwa tata pengelolaan pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, artinya pada pelaksanaannya unsur sarana dan prasarana serta fasilitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan dapat memenuhi fasilitas pelayanan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam menginput data, mengefisiensikan waktu pelayanan, dan lain sebagainya. Untuk itulah, Disnakertrans melakukan sebuah inovasi dalam melakukan pencetakan kartu kuning AK-1 untuk membantu seluruh masyarakat yang sedang mencari kerja dalam melakukan pengisian data secara online tanpa harus datang ke Disnaketrans untuk melakukan pencetakan dengan cepat. Proses pencetakan dapat dilakukan secara mandiri di rumah atau di setiap kantor kecamatan terdekat.

3. Signifikansi

Berdasarkan data yang didapatkan dari *opendata.jabarprov.go.id*, Pada tahun 2021 Jumlah pencari kerja di Kabupaten Bandung Barat mencapai 6.862 Jiwa dengan rincian 4.808 laki-laki dan 2.054 perempuan. Jumlah pencari kerja sangat melonjak signifikan dibandingkan Tahun 2020.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Disnaketrans untuk memberikan tata pengelolaan pemerintahan terbaik dengan lebih mengefisienkan waktu dan cara pembuatan kartu kuning, sehingga data yang dimiliki oleh Disnaketrans terkait jumlah pencari kerja terus meningkat.

Inovasi ini sangat berperan penting dalam mengatasi kekurangan data yang dimiliki oleh Disnaketrans terkait jumlah pencari kerja di Kabupaten Bandung Barat. Ketika muncul kebijakan untuk proses pendaftaran dapat dilakukan secara online jumlah pencari kerja meningkat tiga kali lipat. Jika inovasi ini terus dikembangkan dengan lebih memudahkan masyarakat dalam mencetak kartu kuning maka jumlah pencari kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih mudah didata.

4. Inovatif

Pencetakan kartu kuning merupakan inovasi lanjutan yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat. Namun walaupun pendaftaran telah dilakukan secara online masyarakat sangat kesulitan untuk proses pencetakan kartu kuning di Disnakertrans karena harus datang ke kantor dinas. Dengan adanya inovasi ini memudahkan Disnakertrans dalam mengecek dan mendata calon tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat tidap

bappelitbangda

perlu datang ke tempat pelayanan terpadu Disnakertrans untuk proses pencetakan, tetapi cukup mendatangi kantor kecamatan atau bahkan dapat mencetaknya sendiri di rumah sehingga waktu dan tenaga lebih efisien.

5. Transferabilitas

Strategi dalam melakukan pengembangan pencetakan kartu kuning yang harus dilakukan langsung di Disnakertrans menjadi pencetakan kartu kuning yang dilakukan secara mandiri atau melalui kantor kecamatan terdekat. Kemudahan pencetakan Kartu Kuning AK.1. mengandung manfaat lain, yaitu:

a. Dapat memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang baru memperoleh kartu kuning, informasi ini dapat disampaikan pada *web* atau file *download* masyarakat.
b. Menambah informasi terkait pelatihan sesuai dengan usia dan minat dari calon tenaga kerja tersebut
c. Menambah informasi terkait peluang kerjasama dengan perusahaan luar negeri

Masyarakat yang telah mendapatkan kartu kuning diharapkan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dimilikinya.

6. Sumber Daya dan Berkelanjutan

A. Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan mencakup

1. Sumber daya manusia yang berasal dari
   a. Aparatur Dinas Tenaga Kerja
   b. Aparat Kecamatan
   c. Masyarakat
2. Sumber dana
   a. APBD

B. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan dapat terus dipertahankan keberadaanya sehingga inovasi yang diluncurkan yaitu *Pencetakan Kartu Kuning* dapat terus berlanjut

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

   SDM dapat terus dipertahankan keberadaanya, hanya saja partisipasi masyarakat dapat berganti orang.

b. Sumber Dana

   Dana APBD dapat terus dipertahankan selama manfaatnya dirasakan oleh pelaku masyarakat.

bappelitbangda

7. Dampak

Dampak dibuatnya inovasi pencetakan kartu kuning ini adalah memudahkan masyarakat dalam membuat kartu kuning secara online dan mencetak sendiri kartu kuning di rumah atau di kantor kecamatan terdekat. Dengan demikian Disnakertrans dapat terus meng*update* jumlah daftar pencari kerja di Kabupaten Bandung Barat.

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan *Pencetakan Kartu Kuning* di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a. Pengembangan gagasan

Pemangku kepentingan yang terlibat : Aparat Dinas Tenaga Kerja

b. Formulasi :

- Aparat Dinas Tenaga Kerja
- Pihak ke-3 (Konsultan)

c. Pelaksanaan :

- Aparat Dinas Tenaga Kerja
- Pihak ke-3 (Konsultan)
- Aparat Kecamatan
- Masyarakat

d. Monev :

- Aparat Dinas Tenaga Kerja
- Aparat Kecamatan
- Masyarakat

e. Revisi/Inovasi :

- Aparat Dinas Lingkungan Hidup
- Pihak ke-3 (Konsultan)

5.2.4 Inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

a. Trash Barrier

Trash barrier merupakan cara dan alat sederhana yang dapat menahan dan menangkap sampah yang sudah terlanjur masuk ke sungai. Alat ini juga dapat menjadi pengukur debit air sehingga bisa menjadi alat peringatan dini terhadap musibah banjir. Inovasi ini digagas dengan latar belakang permasalahan sampah di Kabupaten Bandung Barat yang memprihatinkan. Sampah bertumpuk di bantaran bahkan di badan sungai yang sangat berpotensi dapat mencemari lingkungan.

bappelitbangda

Trash barrier sendiri terdapat 2 macam, yaitu *pipe barrier* (terbuat dari pipa PVC dan saringan besi) dapat dipasang di sungai dengan lebar di bawah 10 meter, sedangkan *drum barrier* (terbuat dari drum besar dan saringan besi) dipasang di sungai dengan lebar di atas 10 meter dan *barrier* ini juga dapat digunakan sebagai jembatan pijak untuk pengaambilan tumpukan sampah yang sudah tertahan di aliran sungai. B*arrier* ini dipasang di titik-titik sungai yang berpotensi terdapat tumpukan atau aliran sampah. Dengan instalasi *barrier* ini akan memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkut sampah yang sudah tertahan sehingga sampah di sungai akan lebih mudah diatasi.

Dari hasil sampah yang telah terkumpul maka dapat dipisahkan sesuai dengan merk. Hitung berapa jumlah sampah yang dihasilkan minta kontribusi perusahaan untuk menanggulangi sampah baik dengan CSR dan lain sebagainya. Tidak hanya sampah yang dihasilkan oleh Trash Barier tetapi juga sampah yang berada didarat dapat dipilah sesuai dengan merk perusahaan.

1. Tujuan Inovasi

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak destinasi wisata terbaik di Indonesia. Keindahan alam serta kearifan lokal di Kabupaten Bandung Barat dapat menarik wisatawan domestik maupun wisatawan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, potensi pariwisata alam dapat sebagai daya jual untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.

Tetapi peningkatan ekonomi tidak berbanding lurus dengan peningkatan lingkungan atau dapat dikatakan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat mengalami degradasi lingkungan. Penurunan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya pangalihfungsian lahan hijau menjadi tempat wisata, perumahan, atau bahkan pertambangan yang menyebabkan pembuangan sampah dan limbah semakin menumpuk.

Selain itu, sampah yang biasanya di dominasi oleh plastik sering sekali ditemukan menghiasi bibir sungai di Kabupaten Bandung Barat, tidak hanya berasal dari kiriman sampah rumah tangga tetapi juga dapat berasal dari pabrik-pabrik dan pengusaha yang kurang bertanggung jawab serta minim rasa kepedulian terhadap lingkungan. Penumpukan sampah yang berasal dari sungai akan berdampak bagi ekosistem sungai dan serta berdampak bagi warga setempat seperti penyakit atau bahkan bencana banjir

Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan beberapa cara untuk mengurangi dan menangulangi sampah yang menumpuk di Kabupaten Bandung Barat, namun masih dirasa kurang efektif dalam mengurangi debit sampah yang tidak

tertangani terutama di area sungai. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan hidup menggagas inovasi yang dapat mengurangi penimbunan sampah di sungai dengan menggunakan *Trash barrier*. *Trash barrier* ini bertujuan untuk :

a. Menahan dan menangkap sampah yang terlanjur masuk ke aliran sungai
b. Memudahkan petugas kebersihan dalam melakukan pengambilan sampah di sungai
c. Untuk mendeteksi apabila air berada diatas ketinggian rata-rata untuk menjadi peringatan diri bagi masyarakan sekitar bantaran sungai



Gambar 5.3 Penggunaan *barrier* di Sungai

2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih

Kategori yang dipilih yakni Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan

masyarakat. Untuk itulah Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan sebuah inovasi dalam melakukan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam menjaga sungai dari sampah-sampah yang berserakan dalam sungai.

3. Signifikansi

Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori kota sedang dengan satuan timbulan sampah antara 1,5-2 l/org/hari atau 0,3-04 kg/org/hari. Timbulan sampah harian Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 adalah 314 ton/hari yang terdiri dari 102 ton/hari berasal dari Kecamatan Ngamprah dan 202 ton berasal dari daerah lainnya (KLHK, 2018). Presentase penanganan sampah di Kabupaten Bandung Barat pada periode tahun 2017-2018 baru mencapai 42% sisanya merupakan sampah yang tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

Inovasi ini sangat berperan penting dalam membantu mengatasi permasalahan sampah terutama sampah sungai di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya inovasi ini para petugas kebersihan tidak perlu susah mengambil sampah disungai, petugas sampah tinggal datang ke titik-titik *barrier* yang telah dipasang dan mengambil sampah di antara *barrier* tersebut. Dengan penggunaan *barrier* ini pun dapat mengurangi dampak dari penyumbatan sungai yang dapat mengakibatkan banjir.

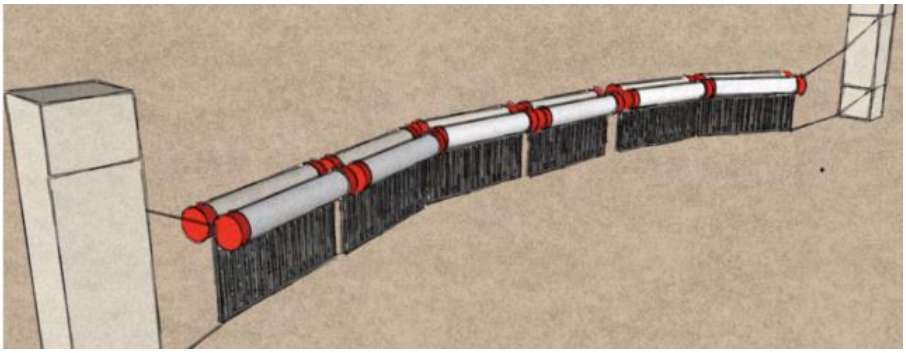
4. Inovatif

Tarsh barrier, merupakan inovasi lanjutan yang telah dilakukan salah satu organisasi lingkungan di Provinsi Bali. Di mana sampah yang berada disungai banyak terjaring dengan baik sehingga mengurangi sampah-sampah yang terhempas ke arah bibir pantai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sangat merespon positif inovasi tersebut. *Trash barrier* ada 2 macam, yaitu:

a. *Pipe barrier*

Terbuat dari pipa PVC sebagai alat utama yang mengapung dan grid besi yang ditempelkan di bawah pipa sebagai saringan. Setiap elemen disambungkan dengan menggunakan 2 kabel besi tebal dan dililitkan di besi atau semen yang berfungsi sebagai jangkar di kedua sisi sungai. Tiap elemen *pipe barrier* bisa digabungkan satu sama lain sampai sepanjang 10 meter lebar sungai. Lalu grid besi ditempatkan sampai 30-40 cm di bawah permukaan air, agar bisa menangkap sampah-sampah yang mengambang di aliran sungai tanpa mengganggu ekosistem yang ada di sungai.

bappelitbangda



Gambar 5.4. Ilustrasi *pipe barrier*

b. *Drum barrier*.

Barrier ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga terdapat pijakan untuk berjalan, yang dapat digunakan petugas agar lebih mudah berjalan di atasnya untuk mengambil sampah. *Drum barrier* ini dibuat menggunakan 4 drum biru sebagai alat pengapung. Rangka utama dan grid saringan dibuat dari besi yang ditempelkan menggunakan kabel besi yang juga dihubungkan ke jangkar besi/semen/pohon besar. Drum barrier ini dipasang untuk sungai dengan lebar lebih dari 10 meter.

Kedua *barrier* ini harus selalu dibersihkan setiap hari dan dilakukan manual oleh petugas kebersihan.





bappedabangda



Gambar 5.5. *Drum barrier*

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berinovasi dengan menambahkan fitur sensor pendeteksi banjir berbasis *Internet of Things (IoT)* sehingga diharapkan juga dapat menjadi *alarm* atau peringatan dini terhadap musibah banjir atau air meluap di Kabupaten Bandung Barat.

5. Transferabilitas

Strategi dalam melakukan pengembangan *Trash barrier* ini telah diterapkan oleh oraganisasi lingkungan hidup di Provinsi Bali. Desain barrier yang dibuat dirasa paling efektif karena telah dilakukan beberapa kali uji coba. Selama 1 berjalan, barrier telah dipassang di 105 titik dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR Provinsi Bali.

Untuk inovasi trash barrier ini, yang harus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan bekerjasama instansi pengembang *barrier* di Indonesia, BNPB, serta masyarakat baik organisasi lingkungan, ormas, juga masyarakat di Kabupaten Bandung Barat secara luas. Selain bekerjasama, pengembangan yang bisa dilakukan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya:

a. Menambah sensor dalam *barrier* yang dapat mendeteksi apabila air berada diatas wajarya. Sensor tersebut terhubung kepada sistem yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, BNPB untuk mencegah potemsi banjir.
b. Menyediakan fasilitas penampungan sampah di setiap titik-titik pemasangan *barrier*.

bappelitbangda

6. Sumber Daya dan Berkelanjutan

C. Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan mencakup

3. Sumber daya manusia yang berasal dari
   e. Aparatur Dinas Lingkugan Hidup
   f. Organisasi Lingkungan
   g. Produsen Barrier
   h. Masyarakat
4. Sumber dana
   b. APBD
   c. CSR BUMN / BUMS / BUMD

D. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan dapat terus dipertahankan keberadaanya sehingga inovasi yang diluncurkan yaitu *Trash Barrier* dapat terus berlanjut

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM dapat terus dipertahankan keberadaanya, hanya saja Lembaga atau organisasi dan partisipasi masyarakat dapat berganti orang.

d. Sumber Dana

Dana APBD dapat terus dipertahankan selama manfaatnya dirasakan oleh pelaku masyarakat. Demikian pula dengan dana CSR.

7. Dampak

Dampak dibuatnya inovasi t*rash barrier* ini diantaranya memudahkan petugas kebersihan dalam mengambil sampah bantaran sungai, mengurangi polusi air akibat pembuangan sampah sembarangan ke sungai, dan masarakat di pinggir sungai dapat merasa bebas dari ancaman sampah dan banjir di Kabupaten Bandung Barat.

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan *Trash barrier* di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a. Pengembangan gagasan

Pemangku kepentingan yang terlibat : Aparat Dinas Lingkungan Hidup

b. Formulasi :

- Aparat Dinas Lingkungan Hidup
- Pihak ke-3 (Produsen barrier)

c. Pelaksanaan :

- Aparat Dinas Lingkungan Hidup
- Pihak ke-3 (Produsen barrier)

bappelitbangda

- Organisasi Lingkungan Hidup
- Pihak swasta pengumpul sampah
- Masyarakat

d. Monev :

- Aparat Dinas Lingkungan Hidup
- Masyarakat

e. Revisi/Inovasi :

- Aparat Dinas Lingkungan Hidup
- Konsultan

5.2.5 Inovasi Klinik UMKM dari Diskopukm

Minimnya keterampilan berusaha (bisnis) manjadi salah satu kendala utama sulit tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Padahal tumbuh dan berkembangnya UMKM merupakan salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Klinik UMKM adalah fasilitas untuk UMKM memperbaiki usahanya. Di klinik, pelaku UMKM berkonsultasi – berdialog, meminta saran dan pendapat serta mendapat bimbingan dari para mentor yang disiapkan di klinik UMKM. Mentor di Klinik UMKM terdiri atas pelaku usaha yang sukses, anggota Kadin/Asosiasi Usaha, Pakar/Akademisi dari Perguruan Tinggi. Tempat/ruang Klinik merupakan Kantor Kecamatan/Desa yang pada Sabtu/Minggu tidak digunakan oleh Aparat Kecamatan/Desa. Konsultasi antara pelaku UMKM dan Mentor dilakukan pada Sabtu – Minggu. Klinik dibuka di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, keberadaan klinik memudahkan pelaku UMKM untuk memperbaiki kinerja usahanya, baik bidang keuangan, produksi, pemasaran, kemasan, franchising, dll. Biaya konsultasi bisa gratis, operasional dibiayai oleh Pemda Kab. Bandung Barat, Kadin / Asosiasi Usaha dan Kampus (Pengabdian pada Masyarakat) dan CSR BUMN.

1. Tujuan Inovasi

Pandemi Covid 19 yang diikuti pembatasan kegiatan masyarakat berdampak besar pada UMKM. Pada Skala Nasional, pertumbuhan UMKM melambat bahkan ratusan ribu UMKM guling tikar. Setelah pandemi mereda, masih banyak UMKM yang belum bisa bangkit, selain karena ketiadaan modal usaha juga minimnya keterampilan berwirausaha dan manajemen

Klinik (Bisnis) UMKM adalah tempat konsultasi dan diskusi antara pelaku UMKM dengan para Mentor yang terdiri atas pelaku usaha yang sukses, anggota/pengurus Kadin/Asosiasi usaha, Pakar/Akademisi, BUMN. Inovasi ini bertujuan :

(a) Meningkatkan kualitas berwirausaha – kewirausahaan

- Mencari peluang usaha

bappelitbangda

- Mendirikan usaha
- Berinovasi
- Mengembangkan pemasaran

(b) Meningkatkan kualitas pengelolaan (manajemen) usaha

- Keuangan termasuk pinjaman ke Bank & Non Bank
- Produksi
- Kualitas
- Kemasan
- SDM
- Proses manajemen (planing – organizing – actuating – controlling)

(c) Mengembangkan skala usaha

- Jenis dan jumlah produk
- Cabang baru
- Franchising
- Reseler

(d) Meningkatkan kontribusi UMKM pada PDRB Kab.Bandung Barat

(e) Turut mengentaskan kemiskinan

2. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih

Kategori yang dipilih yakni Pengentasan Kemiskinan Kab. Bandung Barat pada Maret 2021 ada pada angka 11,3% atau dibawah Cirebon (12,12), Majalengka (12,32%), Indramayu (13,04%), Kuningan (13,1%) dan Kota Tasikmalaya (13,13%)

Angka kemiskinan Kab.Bandung Barat ada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (8,42%). Angka kemiskinan Kab. Bandung Barat naik dari 9,38% pada 2019 dan 11,49% pada 2020. Demikian pula jumlah penduduk miskin, jika pada 2019 berjumlah 159 ribu dan pada 2020 berjumlah 179,5 ribu maka pada 2021 berjumlah 190,8 ribu.

Naiknya prosentase kemiskinan dari jumlah penduduk miskin di Kab. Bandung Barat diicu oleh pandemi covid-19 yang berujung pada pembatasan kegiatan masyarakat. Pandemi covid-19 membuat UMKM menciut volume usahanya, sehingga harus mengurangi pegawai bahkan bangkrut – tutup. Padahal UMKM di Kab.Bandung Barat memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja yang berujung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah mengamanatkan bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta

bappelitbangda

efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan terutama bagi pelaku UMKM.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023 juga menekankan terkait program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi

3. Signifikansi

Mengacu pada Peraturan Bupati No.43 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diantaranya disebutkan pada pasal 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dst
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro – kecil dan Menengah
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan data yang didapatkan dari opendata.jabarprov.go.id, Pada tahun 2021 Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat mencapai 210.717 Pelaku dari berbagai jenis UMKM. Namun akibat pandemi covid 19 lebuh dari 80% pendapatan mereka anjlok bahkan sebagain telah gulung tikar.

Disisi lain, UMKM memiliki kelemahan mendasar dibidang kewirausahaan dan manajemen. Inovasi klinik UMKM menjawab kebutuhan UMKM dan sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi UMKM. Melalui klinik, UMKM dapat berkonsultasi – mendapat therapy terkait penyakit yang ada pada usahanya – bekerjasama – mendapat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan usahanya, disisi lain Klinik UMKM merupakan salah satu aktivitas yang bersentuhan dengan Tupoksi Dinas Koperasi UMKM

4. Inovasi

Inovasi ini merupakan adaptasi dari bimbingan UMKM yang dilakukan BUMN/BRI (Rumah BUMN) serta praktek pada Klinik Kesehatan/Puskesmas. Modifikasi terletak pada :

bappelitbangda

- Tempat/ruang yang digunakan. Yaitu ruang di Kantor Kecamatan/Desa yang pada Sabtu – Minggu tidak termanfaatkan
- Waktu : Sabtu – Minggu
- Mentor : Kadin/Asosiasi Usaha – Praktisi – BUMN – Pakar/Akademisi – Dinas Koperasi
- Biaya : minimal, hanya biaya konsumsi dan atau pengganti uang transport Mentor

Karena Klinik tersebar di 16 Kecamatan Kab.Bandung Barat, maka kedekatan Klinik UMKM dengan pelaku UMKM akan direspon positif dan kendala jarak dapat tereduksi. Karena waktunya terjadwal (Sabtu – Minggu), maka kepastian waktu konsultasi bisa menjadi keunggulan inovasi ini. Selain itu, pemanfaatan waktu Sabtu – Minggu meningkatkan pendayagunaan ruang-ruang / kantor milik pemerintah Kab.Bandung Barat.

Mentor : Merupakan orang/lembaga yang berpengalaman dan kompeten

Biaya : Biaya konsultasi sangat murah, yaitu untuk penyediaan mamin dan pengganti biaya transport mentor

5. Transferabilitas

Masalah yang menerpa UMKM terkait minimnya kewirausahaan dan lemahnya manajemen, merupakan problem di banyak UMKM di Indonesia. Inovasi Klinik UMKM, memiliki potensi untuk dikembangkan/diselenggarakan di Kabupaten/kota lain dan memiliki potensi untuk memecahkan masalah UMKM di Indonesia.

Beberapa bagian dari pembinaan yang dilakukan Rumah BUMN (BRI), hampir beresiko dengan operasional Klinik UMKM dan terbukti berhasil mengembangkan UMKM yang ada di Kota Bandung. Selain itu materi (modul) pembinaan dapat diduplikasi oleh Pemda Kabupaten / Kota lain

6. Sumber Daya Dan Keberlanjutan

a. Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan mencakup

1. Sumber daya manusia yaitu para mentor yang berasal dari
   - Kadin / Asosiasi usaha
   - BUMN – Mitra BUMN
   - Aparatur Dinas Koperasi UMKM
   - Praktisi Bisnis & Konsultan Bisnis
   - Pakar / akademisi Kampus
   - Pelaku UMKM
2. Sumber dana

bappelitbangda

- APBD
- CSR BUMN / BUMS / BUMD
- Mitra Dinas Koperasi UMKM
- Kampus
- Kadin/Asosiasi Usaha

3. Tempat/ruangan

Ruang yang digunakan adalah ruang di Kantor Kecamatan/Desa yang tidak digunakan pada hari Sabtu – Minggu sehingga tidak ada konflik pengunaan terkait ruang yang digunakan untuk Klinik UMKM

b. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan dapat terus dipertahankan keberadaanya sehingga inovasi yang diluncurkan yaitu Klinik UMKM dapat terus berlanjut

- Sumber Daya Manusia (SDM)

  SDM dapat terus dipertahankan keberadaanya, hanya saja lembaga pengirim mentor dapat mengganti orang

- Sumber Dana

  Dana APBD dapat terus dipertahankan selama manfaatnya dirasakan oleh pelaku UMKM. Demikian pula dengan dana CSR, Kampus, Kadin/asosiasi usaha. Secara berangsur, para pelaku UMKM yang sukses, membantu (sharing) pendanaan

7. Dampak

Prakiraan perubahan yang akan terjadi adalah

a) UMKM yang menjadi pelanggan / pasien Klinik UMKM akan merasakan manfaat Klinik UMKM dan secara bertahap mengubah / mereformasi bisnis yang dimilikinya baik dari sisi kewirausahaan maupun manajemen
b) Usaha / bisnis UMKM yang sering memanfaatkan klinik UMKM akan lebih sehat dan faham apa kelemahan usahanya
c) Omzet dan laba UMKM pelanggan Klinik UMKM akan meningkat
d) UMKM sebagai mata pencaharian dapat diandalkan hasilnya
e) Kemiskinan pelaku UMKM berangsur-angsur berkurang
f) Pelaku UMKM lebih berdaya disbanding sebelum memanfaatkan Klinik UMKM demikian pula anggota keluarganya
g) Anggaran pembinaan UMM lebih efektif termanfaatkan dan jangkauan penerima manfaat jauh lebih besar
h) Akuntabilitas pembinaan UMKM meningkat karena terlihatnya mentor dari beragam lembaga

bappelitbangda

i) Masyarakat terdorong untuk terjun keusaha UMKM karena melihat keberhasialn UMKM binaan Klinik UMKM

Indikator perubahan diantaranya

- Omzet UMKM mitra Klinik
- Laba
- Kesehatan usaha (keuangan)
- Cakupan pasar yang dilayani
- Media pemasaran yang digunakan
- Bankable

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

MOMEN Inovasi terkait keterlibatan pemangku jabatan

- Pengembangan gagasan

  Pemangku kepentingan yang terlibat : Aparat Dinas Koperasi UMKM
- Formulasi :

  - Aparat Dinas Koperasi UMKM
  - Pihak ke-3 (Konsultan)
- Pelaksanaan :

  - Aparat Dinas Koperasi UMKM
  - Kecamatan / Desa
  - Perguruan Tinggi (PT) – PTN – PTS
  - Kadin / asosiasi usaha
  - BUMN & mitra BUMN
- Monev :

  - Aparat Dinas Koperasi UMKM
  - BUMN
  - Perguruan Tinggi
  - Kadin/Usaha usaha
- Revisi/Inovasi :

  - Aparat Dinas Koperasi UMKM
  - Konsultan

5.2.6 Inovasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Visit KBB

Visit KBB merupakan *website* yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. *Website* ini sudah dibuat namun masih dalam proses pengembangan. Adapun inovasi yang ditawarkan dalam *website* ini berupa

bappelitbangda

beberapa fitur yang lebih variatif seperti fitur untuk pengguna dengan kondisi disabilitas, fitur Bahasa asing, fitur wisata *virtual* 360, dan *e-purchasing* berupa pemesanan tiket wisata, atraksi, dan penjualan *souvenir* atau makanan khas KBB melalui online yang dibuat lebih atraktif sehingga harapannya dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan domestic maupun luar negeri yang tertarik dan mengunjungi objek wisata di daerah Kabupaten Bandung Barat.

1. Tujuan Inovasi

Kabupaten Bandung Barat (KBB) memiliki banyak objek wisata. Namun objek wisata yang dikenal banyak orang nampak terpusat di daerah utara, sehingga objek wisata di daerah KBB lain masih kurang dilirik dan menjadi sepi dari pengunjung. Kondisi ini diperparah dengan pandemi Covid 19 yang turut menyebabkan banyak tempat wisata yang berada di KBB mengalami penurunan jumlah wisatawan. Kurangnya pemasaran menjadi salah satu masalah utama. Beberapa tempat wisata di KBB masih belum dikenal oleh masyarakat luas karena tidak memiliki strategi pemasaran yang baik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat berencana membuat inovasi pengembangan *website* Visit.kbb.go.id yang dimiliki oleh Disparbud. Inovasi ini bertujuan:

- Untuk meningkatkan jumlah pengunjung objek wisata di KBB
- Untuk menghidupkan kembali tempat pariwisata yang padam akibat pandemi covid19
- Untuk mengembangkan desa wisata yang baru
- Memajukan perekonomian masyarakat

Gambar 1.1 Contoh Logo Aplikasi Visit KBB

2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih

Kategori yang dipilih yakni Tata Kelola Pemerintahan. Dalam Pengelolaan Pemeritahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik telah mengamanatkan bahwa tata pengelolaan pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, artinya Pada pelaksanaannya unsur sarana dan

balitbangda

prasarana serta fasilitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan dapat memenuhi fasilitas pelayanan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi, melaporkan pengaduan dan lain sebagainya. Untuk itulah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan sebuah inovasi dalam melakukan percepatan pembangkitan tempat wisata dengan membuat aplikasi yang bernama VISIT KBB agar informasi yang disampaikan dapat utuh dan memudahkan wisatawan unutuk melihat dan mengecek tempat wisata yang akan dikunjunginya.

3. Signifikansi

Berdasarkan data yang didapatkan dari *jabar.bps.go.id*, Pada tahun 2018 Jumlah wisatawan di Kabupaten Bandung Barat mencapai 121.788 Jiwa, dan ada peningkatan yang signifikan tahun 2019 jumlah wisatawan mencapai 5.440.158 jiwa. Ketika awal pandemic covid-19 tempat wisata ditutup sehingga data di tahun 2020 tidak muncul. Pada Tahun 2021 jumlah wisatawan yang melancong ke Kabupaten Bandung Barat hanya 2.202.146.

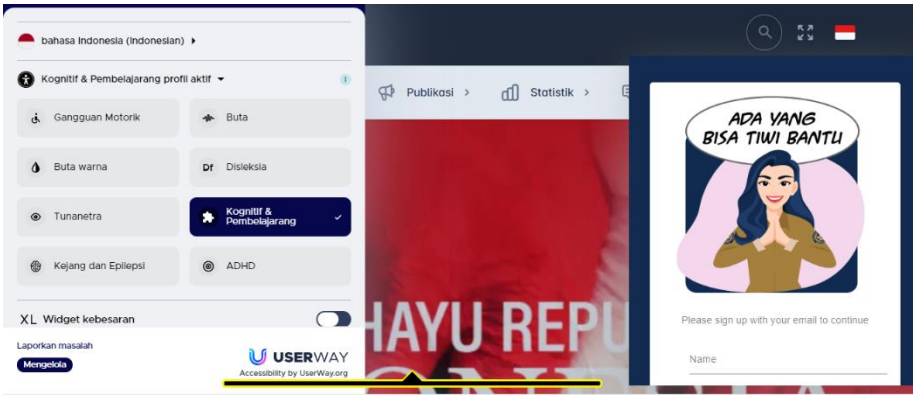
Inovasi yang diusulkan ini memiliki signifikansi yang kuat bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terutama mengenai promosi wisata KBB yang menjadi salah satu tugas mereka. Inovasi ini berperan penting dalam menghidupkan kembali objek wisata dan kebudayaan di KBB. Wisatawan dapat dengan mudah memilih, melihat, dan mendapatkan informasi dari tempat-tempat wisata yang akan dikunjunginya.

4. Inovatif

"Visit KBB" adalah *website* atau portal informasi mengenai aspek pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Saat ini Visit KBB yang berbasis Web masih dalam tahap pengembangan dan dinas terkait masih fokus pada pembenahan ini. Oleh karena itu, dalam kajian inovasi ini beberapa fitur digagas agar web Visit KBB menjadi lebih menarik, di antaranya:

- Menambah data peta tempat-tempat wisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat
- Pilihan Bahasa (Indonesia dan Inggris) yang bertujuan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional
- Fitur bantuan bagi pembaca yang disabilitas (gangguan motoric, buta warna, tuna Netra, disleksia, ADHD, gangguan kognitif, kejang dan epilepsy)

bappelitbangda



Gambar contoh fitur bagi pembaca disabilitas dari Kemenparekraf

- Fitur Calender of Events KBB agar masyarakat luas mengetahui dengan pasti agenda wisata KBB selama setahun penuh
- Fitur wisata virtual 360 berupa video mengenai tour objek-objek wisata Kabupaten Bandung Barat (Video masing-masing objek wisata di daerah KBB dengan durasi sekitar 2,5 -3 menit) yang bisa digunakan di Hp. Video 360 merupakan video yang memperbolehkan penonton untuk melihat tampilan gambar visual secara 360 derajat, teknologi ini sudah banyak digunakan dalam salah satu cara memvisualisasikan suatu kegiatan dengan tampilan yang dapat menampilkan keseluruhan sudut pandang yang ada di sekitar kita sehingga membuat pengalaman menonton video menjadi lebih menarik.



Gambar contoh fitur virtual tour dari website Kota Bandung

- Fitur Pembelian (*purchase*) online untuk tiket atraksi, tiket masuk tempat wisata, maupun untuk pembelian makanan atau souvenir khas Kabupaten Bandung Barat yang bisa juga dihubungkan dengan E-Commers milik UMKM KBB.
- Menambah kolom customer service dan pengaduan wisatawan apabila ada kritik dan saran untuk pengembangan tempat-tempat wisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat

Dengan adanya inovasi ini tempat-tempat wisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat akan lebih ter*ekspose* sehingga membuat calon wisatawan lebih tertarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun internasional.

5. Transferabilitas

Strategi dalam melakukan pengembangan Web pemasaran objek wisata dan kebudayaan yang harus dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat salah satunya dengan cara membuat web yang lebih menarik. Dinas Pariwisata KBB telah membuat usulan awal mengenai website pariwisata dan kebudayaan. Web ini merupakan salah satu inovasi yang bisa dikembangkan sebagai sarana promosi, namun harus dibuat lebih menarik, bahkan harus ramah untuk semua kalangan seperti orang dengan disabilitas. Untuk menarik perhatian wisatawan pun, web harus didesain semenarik mungkin, dari tampilan halaman depan sampai fitur-fitur yang terdapat di dalam web tersebut.

Dengan adanya pengembangan web ini, masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, nyaman, dan mudah. Masyarakat yang membuka website ini diharapkan dapat terbantu dan dalam mencari referensi tempat-tempat wisata dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Barat.

6. Sumber Daya dan Berkelanjutan

a. Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan mencakup

1. Sumber daya manusia yang berasal dari
   - Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
   - Pihak ke-3 (Konsultan)
   - Aparatur Diskominfo
   - Pelaku bisnis pariwisata (Pengusaha objek wisata, pengusaha hotel, pengusaha restoran/rumah makan, dll)
   - Kelompok UMKM KBB
2. Sumber dana

   APBD

b. Keberlanjutan

Sumber daya yang digunakan dapat terus dipertahankan keberadaanya sehingga inovasi yang diluncurkan yaitu *website Visit KBB* dapat terus berlanjut

- Sumber Daya Manusia (SDM)

  SDM dapat terus dipertahankan keberadaanya, hanya saja dapat berganti sesuai dengan kebutuhan pengembangan inovasi.

bappelitbangda

- Sumber Dana

  Dana APBD dapat terus dipertahankan selama manfaatnya dirasakan oleh pelaku masyarakat.

7. Dampak

Dampak yang mungkin terjadi setelah inovasi Visit KBB ini ditindaklanjuti adalah, meningkatnya jumlah kunjungan di web dan ketertarikan masyarakat terhadap daerah wisata di KBB, meningkatnya jumlah kunjungan wisata di daerah KBB, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap tempat wisata yang telah dikunjungi, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembelian tiket wisata atau atraksi dan souvenir atau makanan khas KBB secara online.

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan invosi *Visit KBB* di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a. Pengembangan gagasan

Pemangku kepentingan yang terlibat : Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

b. Formulasi :
   - Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
   - Pihak ke-3 (Konsultan)
   - Diskominfo

c. Pelaksanaan :
   - Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
   - Pihak ke-3 (Konsultan)
   - Diskominfo
   - Pelaku bisnis pariwisata
   - Kelompok UMKM KBB

d. Monev :
   - Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
   - Masyarakat

e. Revisi/Inovasi :
   - Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
   - Konsultan
   - Diskominfo

bappelitbangda

5.2.7 Inovasi dari Kecamatan Ngamprah

a. Gerai KUKMD

Bencana non-alam pandemik Covid-19 menyebabkan berbagai akibat buruk yang merugikan berbagai kalangan masyarakat termasuk para pedagang yang bergerak dalam UMKM. Banyak pelaku UMKM yang gulung tikar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perangkat Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat berupaya membuat inovasi dalam membantu membangkitkan kegiatan UMKM di setiap kecamatan. Inovasi ini bernama GERAI KUKMD. Gerai KUKMD merupakan inovasi yang bisa dilakukan oleh perangkat kecamatan dengan menghimpun pelaku UKM di setiap kecamatan. Inovasi ini bertujuan untuk menghidupkan kegiatan UMKM yang meredup akibat pandemik Covid-19 dan memudahkan UMKM untuk melakukan klinik dan juga inkubasi bisnis. GERAI KUKMD, merupakan inovasi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat dengan membuat Rumah BUMN yang bekerja sama dengan Bank milik BUMN seperti BNI dan BRI. Dampak dibuatnya inovasi Gerai KUKMD ini diantaranya memudahkan masyarakat pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya secara cepat. Perangkat Kecamatan dapat bekerjasama dengan Dinkopukm untuk merealisasikan inovasi KLINIK UKM dengan menyediakan tempat/lahan di kantor kecamatn untuk keberjalanan program tersebut

1. Tujuan Inovasi

Bencana non-alam pandemi Covid 19 menyebabkan berbagai dampak yang disarakan oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk para pedagang yang bergerak dalam UMKM. Dalam Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK 17(1) juga disebutkan bahwa pandemi membuat pertumbuhan ekonomi UMKM melambat. Hal tersebut dipicu dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah, sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat.

Bantuan pemerintah dalam membantu UMKM telah dilakukan diantaranya dengan memberikan bantuan modal bagi pelaku UMKM namun nyatanya hal tersebut tidak dapat membantu secara signifikan, banyak pelaku UMKM yang kembali gulung tikar akibat sulitnya merintis kembali UMKM yang dijalankannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Perangkat Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berupaya membuat inovasi dalam membantu membangkitkan kegiatan UMKM di setiap kecamatan. Inovasi ini bernama GERAI KUKMD. Gerai KUKMD merupakan inovasi yang bisa dilakukan oleh perangkat kecamatan dengan menghimpun pelaku UKM di setiap kecamatan. Inovasi ini bertujuan untuk :

a. Untuk menghidupkan kegiatan UMKM yang meredup akibat pandemic covid-19

bappelitbangda

b. Pemanfaatan kantor kecamatan terutama di hari-hari libur untuk kegiatan UMKM
c. Menghemat inovasi biaya klinik dan incubator bisnis UMKM
d. Memudahkan UMKM untuk melakukan klinik dan juga inkubasi bisnis
e. UMKM dapat bersaing secara kualitas dan kuantitas dengan adanya didirikannya Gerai KUKMD



Gambar 1.1 Contoh Gerai KUKMD

2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih

Kategori yang dipilih yakni Pengentasan Kemiskinan. Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah mengamanatkan bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan terutama bagi pelaku UMKM.

Disamping itu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023 yang juga menekankan terkait program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk itulah Dinas Koperasi dan UKM mengeluarkan sebuah inovasi dalam melakukan percepatan pengentasan kemiskinan teritama bagi pelaku UMKM dengan membuat Klinik UMKM agar Kegiatan UMKM di Kabupaten Bandung Barat dapat kembali maju dan berkembang.

bappelitbangda

3. Signifikansi

Berdasarkan data yang didapatkan dari opendata.jabarprov.go.id, Pada tahun 2021 Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat mencapai 210.717 Pelaku dari berbagai jenis UMKM. Namun akibat pandemic covid 19 lebuh dari 80% pendapatan mereka anjlok bahkan sebagain telah gulung tikar. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM.

Inovasi ini sangat berperan penting dalam membantu membangkitkan kembali pelaku UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya inovasi ini para pelaku UMKM dapat menenerima pembinaan dan pelatihan serta klinik dalam berkonsultasi tentang kegiatan yang dilakukan dan yang paling penting pelaku UMKM dapat merasakan incubator bisnis terhadap UMKM yang dijalankan secara gratis.

4. Inovatif

GERAI KUKMD, merupakan inovasi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Barat dengan membuat Rumah BUMN yang bekerja sama dengan Bank milik BUMN seperti BNI dan BRI. Rumah BUMN memiliki peran sebagai agent of development yang terus berupaya mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instandi atau lembaga lain. Perangkat Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sangat merespon positif program tersebut. Pernagkat kecamatan tinggal menghimpun warga yang memiliki peluang dalam UMKM dan bekerjasama dengan Dinas Koprasi dan UKM dalam merealisasikan rumah BUMN di setiap kecamatan.

5. Transferabilitas

Strategi dalam melakukan pengembangan pelaku UMKM yang harus dilakukan Kecamatan adalah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan dengan bekerjasama dengan Rumah BUMN, selain bekerjasama pelaku UMKM dapat merasakan fasilitas tambahan diantaranya :

a. Mendapatkan Akses Pemodalan, dimana pelaku UMKM mendapatkan permodalan sesuai kebutuhan pengembangan usaha dengan akses KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).
b. Mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan
c. Modul Pengembangan Usaha, pelaku UMKM mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan dengan mengikuti serangkaian modul yang telah dipersiapkan khusus untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM
d. Fasilitas Co-Working Space di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Masyarakat para pelaku UMKM yang telah terlibat dalam Gerai KUKMD diharapkan dapat merasakan peningkatan yang signifikan dari mulai kualitas dan kuantitas penjualan.

6. Sumber Daya dan Berkelanjutan

Inovasi ini merupakan program yang sangat diperlukan pasca masa pandemic covid-19. Dalam aspek ekonomi inovasi ini bisa menghemat biaya untuk melakukan klinik dan incubator bisnis bagi pelaku UMKM. Dalam aspek social, inovasi ini dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk merealisasikan program KLINIK UKM di setiap kecamatan.

7. Dampak

Dampak dibuatnya inovasi Gerai KUKMD ini diantaranya memudahkan masyarakat pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya secara cepat. Perangkat Kecamatan dapat bekerjasama dengan Dinkopukm untuk merealisasikan inovasi KLINIK UKM dengan menyediakan tempat/lahan untuk keberjalanan program tersebut.

8. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Gerai KUKMD di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

a. Bupati Bandung Barat, berperan sebagi pengambil kebijakan dan memberikan arahan langsung
b. Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, yang merencanakan penganggaran untuk operasional.
c. Dinas Koperasi dan UKM, yang memberikan program KLINIK UMKM kepada pelaku UMKM.

b. Inovasi Lain di Kecamatan

***Whatsapp* Terpadu Kecamatan**

Whatsapp terpadu di inisiasi oleh keadaan kecamatan yang sibuk akan mengurus surat surat dan perizinan tertentu, untuk menekan jumlah orang yang datang kekantor kecamatan dibutuhkan system informasi *online*. Penggunaan whatsapp dengan alasan banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. dengan adanya whatsapp terpadu kecamatan, pengurusan ijin dan surat-surat dapat dilakukan secara online dan masyarakat datang ke kantor hanya untuk mengambil berkas yang sudah selesai.

Tujuan inovasi ini diantaranya sebagai berikut:

- Mengefisiensikan masyarakat untuk datang ke kantor kecamatan

bappelitbangda

- Informasi Kecamatan mudah diakses oleh masyarakat
- Mobilitas waktu pengerjaan dapat cepat terselesaikan

Penerapan inovasi ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- Kecamatan menambah SDM untuk menjadi operator *whatsapp dan kurir untuk berkas khusus lansia*
- Setiap pengajuan maupun pengaduan dari masyarakat akan diterima oleh operator
- Operator membuat berkas atas ajuan yang masuk, bisa berupa *G-Form*
- Setiap berkas ditindak lanjuti oleh pihak terkait sampai dengan selesai
- Apabila ada berkas yang keliru atau kurang lengkap, operator akan menghubungi secara langsung
- Jika berkas sudah memenuhi syarat dan proses administrasi sudah selesai dilaksanakan, operator akan menghubungi dan menyuruh untuk datang ke kantor untuk mengambil surat tersebut, apabila bisa di Scan dan di Print secara mandiri ini bisa dilakukan

Inovasi ini merupakan replikasi dari inovasi pelayanan publik di Kecamatan Cibiru Bandung. Namun dalam pelaksanaannya terdapat modifikasi yang menjadi pembeda, yaitu:

- Selain penambahan operator, saat pengambilan berkas terdapat sistem antrian khusus online. Hal ini dilakukan agar pengambilan lebih cepat dan tidak menunggu antrian lain yang sedang melakukan pembuatan surat atau perizinan secara *offline.*
- Ada layanan kurir berkas untuk warga lansia yang membuat surat atau perizinan.

bappelitbangda

bappelitbangda

BAB - 6

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan yang berpedoman pada prinsip *Research and Development* dengan menggunakan teknik SWOT (TOWS) analisis, diperoleh inovasi yang bisa diterapkan pada tujuh perangkat daerah yang terdiri dari enam dinas dan satu kecamatan yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

   Aplikasi PEJOL merupakan aplikasi pelayanan publik yang masuk dalam kategori tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini dapat mengefisiensikan tata kelola pemerintahan seperti mudahnya mendapatkan aspirasi public, biaya survey menjadi lebih efisien, serta mencegah terjadinya komplain masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Aplikasi PEJOL ini bertujuan untuk mengefisiensikan tenaga dan biaya dalam melakukan survey, terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam melakukan laporan, munculnya partisipasi dan pembedayaan masyarakat, dapat mengurangi kecelakaan, dan dapat terhindar dari pelanggaran pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

2. Dinas Sosial

   “SIMBASOS” Sistem Layanan Bantuan Sosial, merupakan inovasi lanjutan yang dilakukan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Social ini memberikan akses kepada petugas penyaluran bantuan seperti RT/ RW untuk mengecek dan memvalidasi warganya yang menerima bantuan. Aplikasi Simbasos merupkan aplikasi pelayanan publik yang masuk dalam kategori pengentasan kemiskinan. Aplikasi ini bertujuan agar masyarakat dan Petugas RT sampai dengan Kecamatan dapat melihat data penerima bantuan secara langsung serta petugas dapat mengupdate serta memvalidasi data penerima bantuan.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

   Kartu kuning merupakan kartu tanda pencari kerja atau yang biasa dikenal AK-1. Biasanya, kartu kuning diperlukan untuk melamar kerja sebagai PNS atau di instansi swasta. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat telah mengembangkan pendaftaran pembuatan kartu kuning secara online, namun dalam fase pencetakannya warga masyarakat masih harus datang ke Dinas Tenaga Kerja. Untuk itu dinas Tenaga kerja membuat inovasi berupa pencetakan kartu kuning yang dapat di cetak sendiri atau melalui kecamatan terdekat. Inovasi ini bertujuan untuk memudah dan mengefisiensikan waktu dan tenaga masyarakat dalam membuat kartu kuning, serta diharapkan dengan dimudahkan pembuatan kartu kuning ini

bappelitbangda

mampu mendeteksi lebih banyak masyarakat yang sedang mencari kerja, dan meminimalisir politik uang dalam proses pencetakan kartu kuning.

4. Dinas Lingkungan Hidup

   Trash barrier merupakan cara dan alat sederhana yang dapat menahan dan menangkap sampah yang sudah terlanjur masuk ke sungai. Alat ini juga dapat menjadi pengukur debit air sehingga bisa menjadi alat peringatan dini terhadap musibah banjir. Inovasi ini digagas dengan latar belakang permasalahan sampah di Kabupaten Bandung Barat yang memprihatinkan. Sampah bertumpuk di bantaran bahkan di badan sungai yang sangat berpotensi dapat mencemari lingkungan. Barrier ini dipasang di titik-titik sungai yang berpotensi terdapat tumpukan atau aliran sampah. Dengan instalasi barrier ini akan memudahkan petugas kebersihan untuk mengangkut sampah yang sudah tertahan sehingga sampah di sungai akan lebih mudah diatasi.

5. Dinas Koperasi dan UKM

   Minimnya keterampilan berusaha (bisnis) manjadi salah satu kendala utama sulit tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Padahal tumbuh dan berkembangnya UMKM merupakan salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Klinik UMKM adalah fasilitas untuk UMKM memperbaiki usahanya. Di klinik, pelaku UMKM berkonsultasi – berdialog, meminta saran dan pendapat serta mendapat bimbingan dari para mentor yang disiapkan di klinik UMKM.

6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

   Visit KBB merupakan website yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Website ini sudah dibuat namun masih dalam proses pengembangan. Adapun inovasi yang ditawarkan dalam website ini berupa beberapa fitur yang lebih variatif seperti fitur untuk pengguna dengan kondisi disabilitas, fitur Bahasa asing, fitur wisata virtual 360, dan *e-purchasing* berupa pemesanan tiket wisata, atraksi, dan penjualan souvenir atau makanan khas KBB melalui online yang dibuat lebih atraktif sehingga harapannya dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan domestic maupun luar negeri yang tertarik dan mengunjungi objek wisata di daerah Kabupaten Bandung Barat.

7. Kecamatan

   Inovasi yang bisa dilakukan oleh perangkat kecamatan adalah dengan membuat Gerai KUKMD (Kumpulan UKM Daerah). Gerai KUKMD merupakan inovasi yang bisa dilakukan oleh perangkat kecamatan dengan menghimpun pelaku UKM di setiap kecamatan. Inovasi ini bertujuan untuk menghidupkan kegiatan UMKM yang meredup akibat pandemi Covid-19. Untuk menghemat biaya klinik bisnis UMKM

bappelitbangda

maka kantor kecamatan, terutama di hari-hari libur, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM.

Demikian usulan inovasi di Kabupaten Bandung Barat. Semoga dapat diterapkan.

bappelitbangda